



BerAKHLAK



# RENCANA KERJA TAHUN 2026

## DPMPTSP KABUPATEN MINAHASA

Jln. Manguni No. 7B, Kel. Sasaran, Kec. Tondano Utara  
Kab. Minahasa - Prov. Sulawesi Utara

95614

[www.dpmptsp.minahasa.go.id](http://www.dpmptsp.minahasa.go.id)

[dpmptsp.minahasa@gmail.com](mailto:dpmptsp.minahasa@gmail.com)

Dpmptsp Kabupaten Minahasa





## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat bimbingan dan perlindungan-Nya maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa telah diselesaikan dengan baik.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 merupakan dokumen rancangan akhir renja yang telah dievaluasi dan diverifikasi untuk menetapkan tingkat kinerja dari berbagai program dan kegiatan yang diinginkan di masa mendatang serta sebagai acuan dalam penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) juga berfungsi sebagai dasar penyusunan APBD dan menunjukkan rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi yang berisi program dan kegiatan serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan program tersebut. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 memuat antara lain pendahuluan, evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dengan tingkat capaian renstra serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta mereview terhadap rencana kerja tahun sebelumnya, tujuan dan sasaran berdasarkan pada pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan, program dan kegiatan, dan penutup.

Demikianlah Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 ini disusun dan biarlah kiranya boleh memberikan informasi, manfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan kegiatan di tahun-tahun mendatang bagi pemerintah daerah, mitra kerja dan masyarakat pada umumnya, masukan dan saran sangat diharapkan untuk meningkatkan sistem dan kinerja lembaga ini, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Minahasa.

Tondano, Desember 2025  
Kepala Dinas,



Mekry J. Sondey, SE, M.Si  
Pembina Utama Muda  
19660506 199003 1 013

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	7
2.1 Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)7	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	35
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)39	
2.3.1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi .....	39
2.3.2. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional55	
2.3.3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan ..	57
2.3.4. Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.....	58
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD .....	60
2.4.1. Perbandingan antara ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.....	61
2.4.2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.....	64
2.4.3. Temuan yang diperoleh dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.....	75
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	76
BAB III TUJUAN DAN SASARAN .....	78
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	78
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja.....	83
3.2.1. Tujuan.....	83
3.2.2. Sasaran .....	83
3.3 Program dan Kegiatan.....	84
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) .....	92
4.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan .....	92
4.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan	94
4.2.1. Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025.....	98

4.3 Penjelasan Ketidaksesuaian .....	113
BAB V PENUTUP.....	127
5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian .....	127
5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan.....	128
5.3 Rencana tindak lanjut.....	128

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Sebagaimana amanat Undang-Undang tersebut bahwa setiap daerah memiliki hak dan kewajiban menyusun rencana pembangunan daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara sistematis, transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, terarah, terpadu, berkelanjutan sesuai dengan level daerah.

Rencana Kerja (Renja) disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memiliki jangka waktu 20 tahun dan merupakan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat lima tahunan. RPJMD lebih lanjut dijabarkan pada dokumen perencanaan daerah tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJMD juga menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya, Renja perangkat daerah tersebut mengacu kepada RKPD. Renja perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman pada Renstra PD dan RKPD.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) ialah penyempurnaan dari Rancangan Awal dan Rancangan Rencana Kerja menjadi Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) PD dengan mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif perangkat daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perda tentang RKPD, serta menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

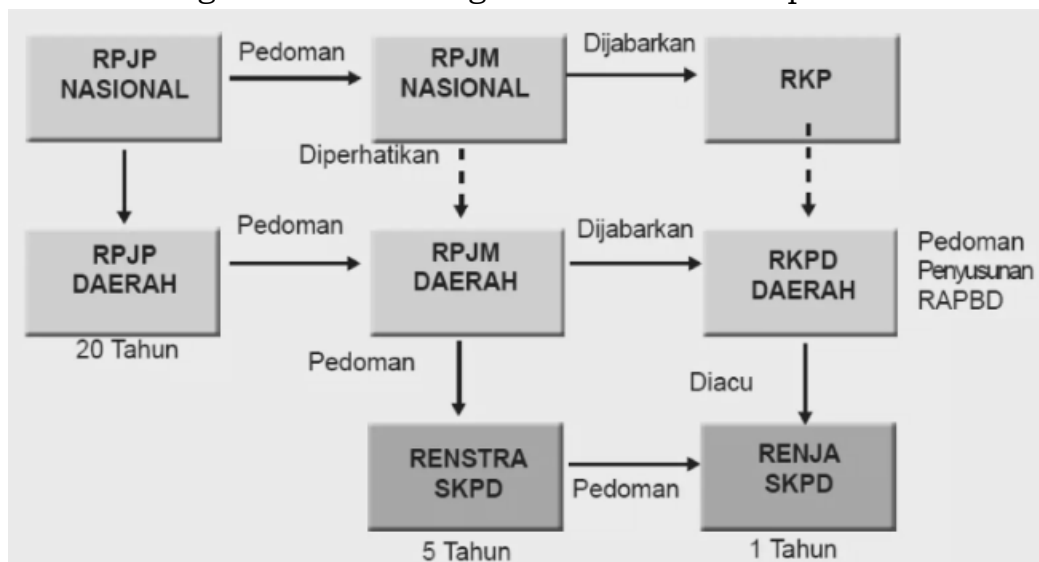
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa. Prinsip penyusunan Renja adalah dengan menyesuaikan dengan Renstra Tahun 2025-2029 baik dari segi pendanaan yang diusulkan serta program, kegiatan, subkegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja yang memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian, target keluaran, total dana kegiatan yang diperlukan.

Dalam penyusunan Renja diperhatikan kondisi internal dan eksternal yang terangkum dalam isu-isu strategis, yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah, peluang dan tantangan bagi pengembangan wilayah Kabupaten Minahasa dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis Nasional dan Provinsi Sulawesi Utara.

Renja disusun sebagai acuan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi agar sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

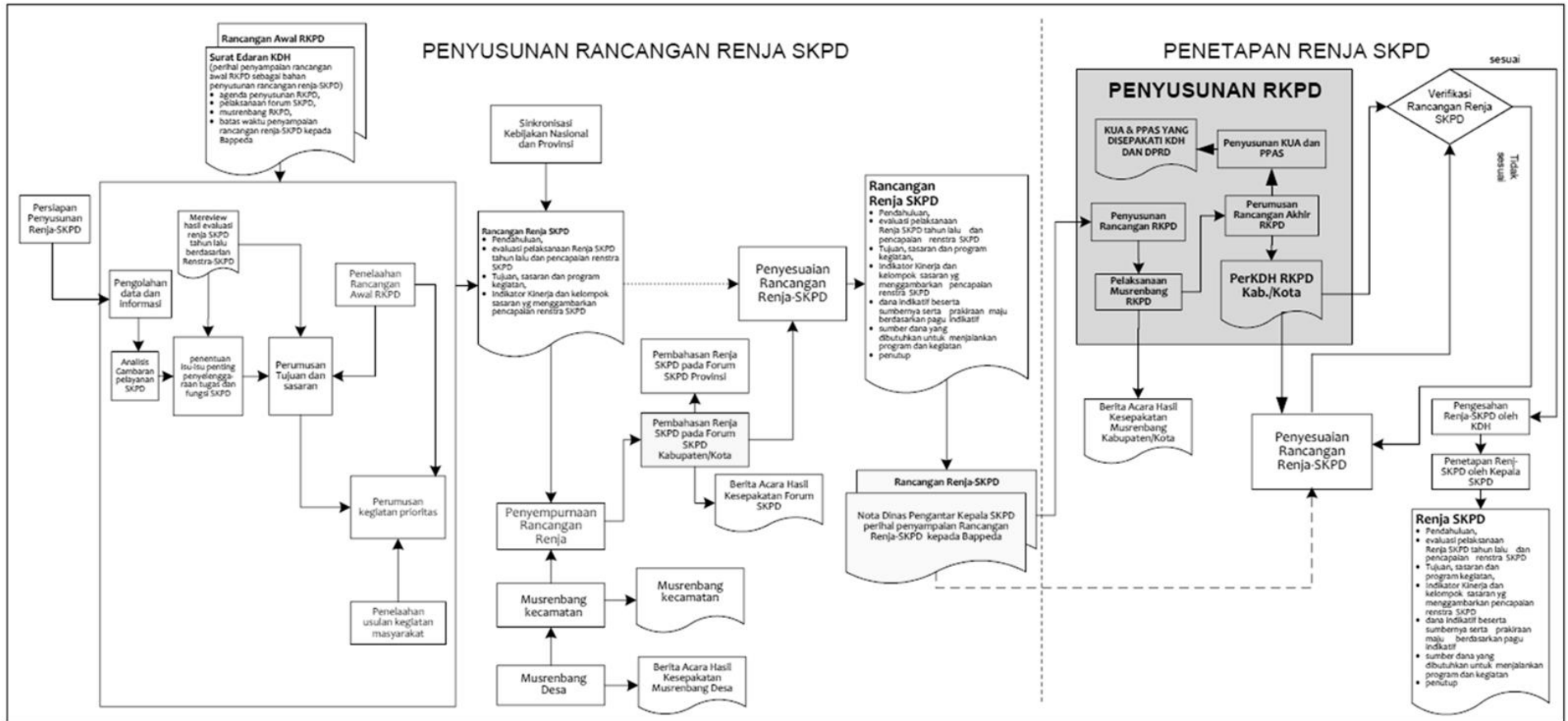
Berikut adalah diagram alur perencanaan pembangunan daerah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:

Gambar 1.1 Diagram alur hubungan antar dokumen perencanaan daerah



Berdasarkan diagram alur diatas, seluruh dokumen merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu serta harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Perangkat daerah wajib menyusun Renstra setiap lima tahun sekali dan Renja setiap tahun yang merupakan penjabarannya.

Gambar 1.2 Diagram alur penyusunan Renja



## 1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum lainnya yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 Tahun 2023 pengganti Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 – 2045;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2024);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;
19. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa;
20. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa adalah untuk menjadikan bahan acuan tentang tujuan dan sasaran tahunan dalam melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2026, dan bahan evaluasi dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Tahun 2025.

Tujuannya sebagai pedoman pelaksanaan beberapa program, kegiatan dan subkegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun Anggaran 2026, tolok ukur dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja SDM DPMPTSP Kabupaten Minahasa selama 1 (satu) tahun dan acuan dalam

penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rencana kerja sebagai berikut :

##### BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

##### BAB II Hasil evaluasi pelaksanaan renja PD tahun lalu

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian renstra PD
- 2.2 Analisis kinerja pelayanan
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

##### BAB III Tujuan dan sasaran PD

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran renja PD
- 3.3 Program dan kegiatan

##### BAB IV Rencana kerja dan pendanaan PD

##### BAB V Penutup

## BAB II

### HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2024 ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan DPMPTSP Kabupaten Minahasa dalam melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan renstra serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dilakukan setiap triwulan berdasarkan data realisasi kinerja dan anggaran tahun berjalan. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda Kabupaten Minahasa setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan, untuk selanjutnya dilakukan evaluasi. Bila berdasarkan hasil evaluasi oleh Bappelitbangda Kabupaten Minahasa ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, maka Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

Pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan realisasi keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD, sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Realisasi kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 sebanyak 3 (tiga) program, 7 (tujuh) kegiatan, 12 (duabelas) subkegiatan dengan sumber DAU, 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 3 (tiga) subkegiatan dengan sumber DAK, realisasinya mencapai 92,34% atau sebesar Rp. 3.167.448.102,- (*tiga milyar seratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus dua rupiah*) dari total anggaran Rp. 3.430.109.230,- (*tiga milyar empat ratus tiga puluh juta seratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah*).

Realisasi kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 sebanyak 4 (empat) program, 9 (sembilan) kegiatan, 12 (duabelas) subkegiatan dengan sumber DAU, 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 3 (tiga) subkegiatan dengan sumber DAK, realisasinya mencapai 93,34% atau sebesar Rp. 3.104.193.004,- (*tiga milyar seratus empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu empat rupiah*) dari total anggaran Rp.

3.325.675.032,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga puluh dua rupiah), dengan rekapitulasi realisasi anggaran, program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan dapat dilihat pada tabel dibawah.

Realisasi kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) program, 7 (tujuh) kegiatan, 10 (sepuluh) subkegiatan dengan sumber DAU, 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 3 (tiga) subkegiatan dengan sumber DAK, dengan realisasi mencapai 94,12% atau sebesar Rp. 3.101.071.735,- (tiga milyar seratus satu juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) dari total anggaran Rp. 3.294.632.934,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).

Tabel 2.1 Evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan/ subkegiatan Tahun 2024

No	Uraian program/kegiatan/ subkegiatan	Alokasi anggaran (Rp)		Realisasi			
		2023	2024	Anggaran		%	
				2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program promosi penanaman modal	96.977.940	119.424.000	90.019.360	111.894.266	92,82	93,69
	1 Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah	96.977.940	119.424.000	90.019.360	111.894.266	92,82	93,69
	1 Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah Kabupaten/ Kota	96.977.940	119.424.000	90.019.360	111.894.266	92,82	93,69
2	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	552.949.925	400.428.300	447.664.267	398.823.700	80,96	99,60
	2 Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota	552.949.925	400.428.300	447.664.267	398.823.700	80,96	99,60
	2 Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	94.125.000		82.425.000		87,57	
	3 Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	221.070.475		213.884.817		96,75	
	4 Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan	237.754.450		151.354.450		63,66	

No	Uraian program/kegiatan/subkegiatan	Alokasi anggaran (Rp)		Realisasi			
				Anggaran		%	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	penanaman modal						
	2 Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya		59.912.600		58.708.000		97,99
	3 Bimbingan teknis kepada pelaku usaha		219.664.000		219.264.000		99,82
	4 Pengawasan PM		120.851.700		120.851.700		100,00
3	Program pelayanan penanaman modal	93.600.000	1.200.000	93.600.000	1.195.000	100,00	99,58
	3 Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota	93.600.000	1.200.000	93.600.000	1.195.000	100,00	99,58
	5 Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem	93.600.000	1.200.000	93.600.000	1.195.000	100,00	99,58
4	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	5.780.000	-	5.780.000	-	100,00	-
	4 Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/ Kota	5.780.000	-	5.780.000	-	100,00	-
	6 Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	5.780.000	-	5.780.000	-	100,00	-
5	Program penunjang	2.576.367.167	2.773.580.634	2.467.129.377		100,00	

No	Uraian program/kegiatan/subkegiatan	Alokasi anggaran (Rp)		Realisasi			
				Anggaran		%	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota						
	5 Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah anggaran	799.200		799.200		100,00	
	7 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	799.200		799.200		100,00	
	6 Administrasi keuangan perangkat daerah	2.252.858.707	2.376.386.464	2.146.229.706	2.193.523.065	95,27	92,30
	8 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.252.858.707	2.376.386.464	2.146.229.706	2.193.523.065	95,27	92,30
	7 Administrasi umum perangkat daerah	67.507.700	46.343.500	67.302.271	46.197.104	99,70	99,68
	9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	10.923.700	14.171.500	10.908.800	14.031.900	99,86	99,01
	10 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.000.000	-	4.000.000	-	100,00	-
	11 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	52.584.000	32.172.000	2.393.471	32.165.204	99,64	99,98
	8 Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	9.545.000	14.799.000	9.540.000	14.725.000	99,95	99,50
	12 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	9.545.000	14.799.000	9.540.000	14.725.000	99,95	99,50
	9 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	211.726.560	302.121.670	209.329.200	300.823.700	98,87	99,57
	13 Penyediaan jasa surat menyurat	-	4.000.000	-	4.000.000	-	100,00
	14 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	28.126.560	114.521.670	25.729.200	109.723.700	91,48	95,81
	15 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	183.600.000	183.600.000	183.600.000	189.600.000	100,00	103,27
	10 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	33.930.000	33.930.000	33.929.000	33.889.900	100,00	99,88

No	Uraian program/kegiatan/ subkegiatan	Alokasi anggaran (Rp)		Realisasi			
				Anggaran		%	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	pemerintahan daerah						
	16 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	33.930.000	33.930.000	33.929.000	33.889.900	100,00	99,88
	Jumlah	3.325.675.032	3.294.632.934	3.104.193.004	3.101.071.735	93,34	94,12

Tabel 2.2 Tabel rekapitulasi realisasi anggaran DPMPTSP Kabupaten Minahasa

Uraian	Anggaran (Rp.)			Realisasi (Rp.)			Capaian %		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Belanja operasi	3.424.871.230	3.316.130.032	3.279.833.934	3.170.072.698	3.094.653.004	3.084.648.069,80	92,56	93,32	94,09
Belanja modal	5.238.000	9.545.000	14.799.000	5.100.000	9.540.000	14.725.000	97,37	99,95	99,50
Total	3.430.109.230	3.325.675.032	3.137.099.877	3.175.172.698	3.104.193.004	3.101.071.735	92,57	93,34	94,12

Tabel 2.3 Capaian Kinerja dan Anggaran Program Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1	Peningkatan Penanaman Modal	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp. 1.000.000.000.000	Rp. 4.792.663.087.692	479,27
2	Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan di Daerah	Nilai realisasi investasi di daerah	Rp. 125.000.000.000	Rp. 129.045.832.480	103,24
3	Meningkatkan kualitas kinerja DPMPTSP yang bersih, akuntabel dan profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	*4 (81)	*4 87	*4 87,36

Tabel 2.4 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) s/d Tahun 2023 Kabupaten Minahasa (T-C.29.)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2024)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2025) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
	Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar									
2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal									
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	Rp. 170,000,000,000					Rp. 130,000,000,000		
		Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	-	%	2 %					
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang Menjadi Wewenang Kabupaten/ Kota	14 Dokumen	%	1 Dokumen	-	-	14 Dokumen		
2 18 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen		
2 18 02 2.01 03	Fasilitasi Kemitraan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di Daerah	12 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen		
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah		Kegiatan Usaha	2 Kegiatan	-	-			
2 18 02 2.01 04	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2024)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2025) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
	Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Berbasis Resiko								
2 18 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	25 Dokumen	Dokumen	6 Dokumen	-	-	25 Dokumen		
2 18 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen		
2 18 02 2.02 03	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah Daerah yang Telah Dilaksanakan Pemutakhiran Data Potensi Investasi	23 Daerah	-	-	-	-	23 Daerah		
2 18 02 2.02 04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Dokumen	5 Dokumen	-	-	1 Dokumen		
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Dokumen	5 Dokumen	-	-			
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	24.00 %					16.00 %		
		Persentase Kerja Sama Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti	20.00 %					20.00 %		
		Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)		Investor	20 Investor	Investor = 2.371 Non UMK = 8 UMK = 2.363				
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	200 Pengunjung	Pengunjung	50 Pengunjung	Pengunjung		180 Pengunjung		
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	15 Dokumen	Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	66,67	9 Dokumen		
2 18 03 2.01 03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	10 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	-	-	3 Dokumen		
2.18.04	Program Pelayanan	Persentase Pelaku Usaha yang	24.05 %					16.36 %		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2024)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2025) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
	Penanaman Modal	Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan Nilai realisasi penanaman modal bidang perizinan		1.457.156.011.532	1.000.000.000.000	4.792.663.087.692	479,27			
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	56	46 Izin/ Non Izin Izin	12 perizinan sektor (OSS) 2 PBG 32 Izin/ Non Izin Manual	46 perizinan (12 perizinan sektor (OSS) 2 PBG 32 Izin/ Non Izin Manual)	100	56		
2 18 04 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	6 Dokumen	Kegiatan usaha	4 Kegiatan	-	-	4 Dokumen		
2 18 04 2.01 06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	200 Pelaku usaha	Pelaku usaha	10	2.368	23.680	100 Pelaku usaha		
2 18 04 2.01 07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 Pelaku usaha					100 Pelaku usaha		
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		Orang	-	-	-			
2 18 04 2.01 08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan	100 Kegiatan usaha					100 Kegiatan usaha		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2024)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2025) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
	risiko	Berusaha Berbasis Resiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha								
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal		Kegiatan usaha	120 Pelaku Usaha	-	-			
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha	20.00%	%	10 Laporan	353.831.173	99,60	0.00%		
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	4 Laporan		
2 18 05 2.01 04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	4 Kegiatan Usaha					8 Kegiatan Usaha		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (Pelaku Usaha)		Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha					
2 18 05 2.01 05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	250 Pelaku Usaha					150 Pelaku Usaha		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi		Kegiatan Usaha	12 Kegiatan					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2024)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2025) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
	Pelaksanaan Penanaman Modal	Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal								
2 18 05 2.01 06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	30 Kegiatan Usaha					30 Kegiatan Usaha		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan		Kegiatan Usaha	24 Kegiatan					
2 18 06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	20 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	20 %		
2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Laporan	Sistem	1 Paket	1 Paket	100	12 Laporan		
2 18 06 2.01 02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen		
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1. Nilai SAKIP 2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	A 84	-	A 81	CC 87		B 80		
2 18 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	15 Dokumen	100%	13 Dokumen	13 Dokumen	100	15 Dokumen		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2024)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2025) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kinerja yang ditetapkan								
2 18 01 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	5 Dokumen		
2 18 01 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen		
2 18 01 2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen		
2 18 01 2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen		
2 18 01 2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen		
2 18 01 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	4 Laporan		
2 18 01 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan		
2 18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Teradministrasi	100 %	100%	100%	100%	100	100 %		
2 18 01 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	17 Orang/bulan	25 ASN	14 ASN	56	25 Orang/bulan		
2 18 01 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	1 Dokumen		
2 18 01 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	0 Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	-	-	0 Dokumen		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2024)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2025) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD								
2 18 01 2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	-	-	0 Dokumen		
2 18 01 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	Laporan	1 Laporan	-	-	0 Laporan		
2 18 01 2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen		
2 18 01 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0 Laporan	Laporan	12 Laporan	-	-	0 Laporan		
2 18 01 2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	-	-	1 Dokumen		
2 18 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terfasilitasi	97 %	-	-	-	-	95 %		
2 18 01 2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen		
2 18 01 2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen		
2 18 01 2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan	-	-	-	-	0 Laporan		
2 18 01 2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2024)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2025) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
	Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD								
2 18 01 2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan		
2 18 01 2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan		
2 18 01 2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen		
2 18 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi Daerah	97 %	95%	95%	-	-	95 %		
2 18 01 2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	20 Unit	Unit	10 Unit	-	-	20 Unit		
2 18 01 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	96 Paket	Paket	96 Paket	-	-	96 Paket		
2 18 01 2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	-	-	12 Dokumen		
2 18 01 2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	-	-	12 Dokumen		
2 18 01 2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	-	-	12 Dokumen		
2 18 01 2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Orang	5 Orang	-	-	5 Orang		
2 18 01 2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	Orang	50 Orang	-	-	50 Orang		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2024)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2025) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
2 18 01 2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	Orang	5 Orang	-	-	5 Orang		
2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terfasilitasi	96	90 %	92 %	99,50	99,50	95		
2 18 01 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	12 Paket	-	-	12		
2 18 01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12		
2 18 01 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket	20 Paket	-	-	12		
2 18 01 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	1 Paket	-	-	4		
2 18 01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	110 meter <sup>2</sup> 21.600 lembar	12 Paket	-	-	12		
2 18 01 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0	768 exemplar	1 Dokumen	-	-	0		
2 18 01 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	12 Laporan	-	-	12		
2 18 01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	11 Orang 260 Orang 250 Dus	12 Laporan	3 Laporan	25	12		
2 18 01 2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	Dokumen	12 Dokumen	-	-	12		
2 18 01 2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	Dokumen	12 Dokumen	-	-	12		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2024)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2025) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
2 18 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai RKBMMD	96	99,95	93 %	99.50	106.98	95		
2 18 01 2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	-	0 Unit	-	-	0		
2 18 01 2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	-	0 Unit	-	-	0		
2 18 01 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	-	20 Unit	-	-	20		
2 18 01 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	1 Unit	10 Unit	2 Unit	20	6		
2 18 01 2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	1 Unit	-	-	0		
2 18 01 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	-	1 Unit	-	-	0		
2 18 01 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	-	1 Unit	-	-	0		
2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98	98,87	97 %	99,57	106,26	98		
2 18 01 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	100	12		
2 18 01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	100	12		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2024)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2025) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
2 18 01 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Unit/ Kali	12 Laporan	-	-	0		
2 18 01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	100	12		
2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara sesuai RKPBMMD	94	91 %	92 %	99,88	108,56	93		
2 18 01 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100	2		
2 18 01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	-	Unit	-	-	0		
2 18 01 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	-	20 Unit	-	-	0		
2 18 01 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	-	10 Unit	-	-	0		
2 18 01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	-	1 Unit	-	-	0		
2 18 01 2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	-	1 Unit	-	-	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2024)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2025) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
2 18 01 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	-	1 Unit	-	-	0		

Tabel 2.5 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra DPMPSTSP s/d Tahun 2024 Kabupaten Minahasa (T-C.29.)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2024)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (TW II 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
	Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar									
2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal									
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	Rp. 170,000,000,000					Rp. 130,000,000,000	Rp. 226.646.712.348	174,34
		Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	-	%	2 %					
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang Menjadi Wewenang Kabupaten/ Kota	14 Dokumen	%	1 Dokumen	-	-	14 Dokumen		
2 18 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen		
2 18 02 2.01 03	Fasilitasi Kemitraan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di Daerah	12 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen		
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah		Kegiatan Usaha	2 Kegiatan	-	-			
2 18 02 2.01 04	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen		
2 18 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi	Tersedianya Peta Potensi	25 Dokumen	Dokumen	6 Dokumen	-	-	25 Dokumen		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2024)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (TW II 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
	Investasi Kabupaten/Kota	Investasi Kabupaten/Kota								
2 18 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen		
2 18 02 2.02 03	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah Daerah yang Telah Dilaksanakan Pemutakhiran Data Potensi Investasi	23 Daerah	-	-	-	-	23 Daerah		
2 18 02 2.02 04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Dokumen	5 Dokumen	-	-	1 Dokumen		
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Dokumen	5 Dokumen	-	-			
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	24.00 %					16.00 %		
		Persentase Kerja Sama Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti	20.00 %					20.00 %		
		Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)		Investor	20 Investor	Investor = 2.371 Non UMK = 8 UMK = 2.363			Investor = 2.450	
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	200 Pengunjung	Pengunjung	50 Pengunjung	Pengunjung		180 Pengunjung		
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	15 Dokumen	Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	66,67	9 Dokumen		
2 18 03 2.01 03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	10 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	-	-	3 Dokumen		
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan	24.05 %					16.36 %		
		Nilai realisasi penanaman modal bidang perizinan		1.457.156.011.532		1.000.000.000.000	4.792.663.087.692	479,27		
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan	Jumlah Pelayanan Perizinan dan	56	46 Izin/ Non Izin	12 perizinan	46 perizinan	100	56		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2024)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (TW II 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
	Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Izin	sektor (OSS) 2 PBG 32 Izin/ Non Izin Manual	(12 perizinan sektor (OSS) 2 PBG 32 Izin/ Non Izin Manual)				
2 18 04 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	6 Dokumen	Kegiatan usaha	4 Kegiatan	-	-	4 Dokumen		
2 18 04 2.01 06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	200 Pelaku usaha	Pelaku usaha	10	2.368	23.680	100 Pelaku usaha	2.450	95,92
2 18 04 2.01 07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 Pelaku usaha					100 Pelaku usaha	2.450	95,92
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		Orang	-	-	-			
2 18 04 2.01 08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	100 Kegiatan usaha					100 Kegiatan usaha		
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal		Kegiatan usaha	120 Pelaku Usaha	-	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2024)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (TW II 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha	20.00%	%	10 Laporan	353.831.173	99,60	0.00%		
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	4 Laporan		
2 18 05 2.01 04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	4 Kegiatan Usaha					8 Kegiatan Usaha		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (Pelaku Usaha)		Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha					
2 18 05 2.01 05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	250 Pelaku Usaha					150 Pelaku Usaha		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		Kegiatan Usaha	12 Kegiatan					
2 18 05 2.01 06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	30 Kegiatan Usaha					30 Kegiatan Usaha		
	Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan		Kegiatan Usaha	24 Kegiatan					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2024)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (TW II 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
	Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan								
2 18 06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	20 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	20 %		
2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Laporan	Sistem	1 Paket	1 Paket	100	12 Laporan	6 Laporan	50
2 18 06 2.01 02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	6 Dokumen	50
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1. Nilai SAKIP 2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	A 84	-	A 81	CC 87		B 80	94,98	
2 18 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang ditetapkan	15 Dokumen	100%	13 Dokumen	13 Dokumen	100	15 Dokumen	10 Dokumen	66,67
2 18 01 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	5 Dokumen	3 Dokumen	60
2 18 01 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2 18 01 2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2 18 01 2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2024)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (TW II 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
2 18 01 2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	-	-
2 18 01 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	4 Laporan	2 Laporan	50
2 18 01 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	1 Laporan	50
2 18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Teradministrasi	100 %	100%	100%	100%	100	100 %	20,72%	20,72
2 18 01 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	17 Orang/bulan	25 ASN	14 ASN	56	25 Orang/bulan	14 Orang/bulan	56
2 18 01 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	1 Dokumen		
2 18 01 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	-	-	0 Dokumen		
2 18 01 2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	-	-	0 Dokumen		
2 18 01 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	Laporan	1 Laporan	-	-	0 Laporan		
2 18 01 2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen		
2 18 01 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	0 Laporan	Laporan	12 Laporan	-	-	0 Laporan	6 Laporan	
2 18 01 2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	-	-	1 Dokumen	6 Laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2024)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (TW II 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
2 18 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terfasilitasi	97 %	-	-	-	-	95 %		
2 18 01 2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen		
2 18 01 2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen		
2 18 01 2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan	-	-	-	-	0 Laporan		
2 18 01 2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan		
2 18 01 2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan		
2 18 01 2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan		
2 18 01 2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen		
2 18 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi	97 %	95%	95%	-	-	95 %		
2 18 01 2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	20 Unit	Unit	10 Unit	-	-	20 Unit		
2 18 01 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	96 Paket	Paket	96 Paket	-	-	96 Paket		
2 18 01 2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	-	-	12 Dokumen	6 Dokumen	50
2 18 01 2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	-	-	12 Dokumen		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2024)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (TW II 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
2 18 01 2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	-	-	12 Dokumen	6 Dokumen	50
2 18 01 2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Orang	5 Orang	-	-	5 Orang	-	
2 18 01 2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	Orang	50 Orang	-	-	50 Orang	-	
2 18 01 2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	Orang	5 Orang	-	-	5 Orang	-	
2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terfasilitasi	96	90 %	92 %	99,50	99,50	95		
2 18 01 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	12 Paket	-	-	12		
2 18 01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12		
2 18 01 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket	20 Paket	-	-	12		
2 18 01 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	1 Paket	-	-	4		
2 18 01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	110 meter <sup>2</sup> 21.600 lembar	12 Paket	-	-	12		
2 18 01 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	768 exemplar	1 Dokumen	-	-	0		
2 18 01 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	12 Laporan	-	-	12		
2 18 01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	11 Orang 260 Orang 250 Dus	12 Laporan	3 Laporan	25	12		
2 18 01 2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	Dokumen	12 Dokumen	-	-	12		
2 18 01 2.06.11	Dukungan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Dukungan	12	Dokumen	12 Dokumen	-	-	12		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2024)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (TW II 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
2 18 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai RKBMD	96	99,95	93 %	99.50	106.98	95		
2 18 01 2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	-	0 Unit	-	-	0		
2 18 01 2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	-	0 Unit	-	-	0		
2 18 01 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	-	20 Unit	-	-	20		
2 18 01 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	1 Unit	10 Unit	2 Unit	20	6	-	-
2 18 01 2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	1 Unit	-	-	0		
2 18 01 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	-	1 Unit	-	-	0		
2 18 01 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	-	1 Unit	-	-	0		
2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98	98,87	97 %	99,57	106,26	98	17,16%	17,16
2 18 01 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	100	12 Laporan	6 Laporan	50
2 18 01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	100	12 Laporan	6 Laporan	50
2 18 01 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Unit/ Kali	12 Laporan	-	-	0		
2 18 01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	100	12 Laporan	6 Laporan	50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2024)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja PD tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (TW II 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara sesuai RKPBMMD	94	91 %	92 %	99,88	108,56	93	13,79%	13,79
2 18 01 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100	2 Unit	1 Unit	50
2 18 01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	-	Unit	-	-	0		
2 18 01 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	-	20 Unit	-	-	0		
2 18 01 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	-	10 Unit	-	-	0		
2 18 01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	-	1 Unit	-	-	0		
2 18 01 2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	-	1 Unit	-	-	0		
2 18 01 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	-	1 Unit	-	-	0		

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun teknis sesuai dengan kewenangannya dibidang urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu perizinan terpadu. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan digunakan program kegiatan tahun 2024, kinerja DPMPTSP Kabupten Minahasa dapat untuk mengukur/ memperkirakan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2026. Capaian kinerja merupakan informasi yang berisi ukuran kinerja yang dicapai setelah melaksanakan program dan kegiatan serta pengukurannya dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan dilakukan sesuai Renstra PD Tahun 2025-2029 dalam upaya peningkatan realisasi nilai investasi dan jumlah investor yang menanamkan modalnya melalui kebijakan penanaman modal, promosi, pelayanan, pengendalian pelaksanaan dan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal. Indikator kinerja adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang merupakan unsur utama akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja menjadi dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran PD. Target NI Tahun 2024 adalah 1 trilyun rupiah dengan capaian sebesar 4.792.663.087.692 rupiah, sedangkan jumlah investor sebanyak 2.371 dari target sebanyak 20 investor.

Beberapa indikator kinerja utama (IKU) sesuai dengan Renstra Tahun 2025-2029 yang menggambarkan kinerja pelayanan DPMPTSP antara lain :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik, merupakan indikator penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota dengan realisasi Tahun 2023 mencapai nilai 87 dan Tahun 2024 nilai 87 dengan kategori B (baik). Survei kepuasan masyarakat (SKM) merupakan gambaran untuk menjelaskan pendapat dari masyarakat/ pelaku usaha terhadap mutu dan kualitas pelayanan dalam mendukung pencapaian IKM;

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian IKM antara lain :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko/ Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA), maka aplikasi OSS RBA digunakan dalam pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha yang berbentuk badan usaha maupun perorangan, usaha mikro, kecil, menengah maupun besar, baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum OSS. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat

komposisi modal asing. Manfaat penggunaan OSS RBA antara lain:

- Berbagai pengurusan perizinan berusaha dipermudah baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin;
- Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan tepat waktu;
- Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat;
- Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).

b. Pemanfaatan aplikasi perizinan online dengan nama SiCANTIK merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk publik berupa sistem cloud yang disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat digunakan oleh instansi pusat maupun daerah. SiCANTIK merupakan aplikasi berbasis web untuk perizinan berusaha maupun layanan lainnya yang tidak diakomodasi dalam OSS RBA di DPMPTSP Kabupaten Minahasa.

2. Jumlah nilai investasi berskala Nasional (PMDN/ PMA), Tahun 2024 sebesar Rp. 4.792.663.087.692,- nilai investasi Tahun 2023 sebesar Rp. 1.457.156.011.532;
3. Nilai realisasi investasi di daerah, Tahun 2024 Rp. 99.483.868.965,- dan Tahun 2023 sebesar Rp. 201.147.433.804.

Nilai realisasi investasi di daerah dengan asumsi bahwa ketika pelaku usaha mengajukan nomor induk berusaha (NIB) dan wajib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) setiap triwulan (3 bulan sekali) yang terdiri dari Laporan Konstruksi dan Laporan Produksi, serta pelaku usaha kecil wajib untuk melaporkan LKPM setiap semester (6 bulan sekali). Untuk Usaha Mikro, nilai investasi atau data proyek yang diinput dalam sistem OSS RBA diluar nilai tanah dan bangunan karena Usaha Mikro tidak wajib melaksanakan LKPM. Hal ini disebabkan karena DPMPTSP kabupaten Minahasa lebih giat melakukan sosialisasi/ bimtek serta pelaksanaan pengawasan langsung kepada pelaku usaha dan memfasilitasi tatacara penyampaian laporan kegiatan penanaman modal.

Periode pelaporan LKPM :

- a. Bagi Pelaku Usaha kecil, LKPM disampaikan setiap 6 bulan (semester):

- Semester I: Pelaporan tanggal 1-10 Juli;
  - Semester II: Pelaporan tanggal 1-10 Januari tahun berikutnya
- b. Bagi Pelaku Usaha menengah dan besar, LKPM disampaikan setiap 3 bulan (Triwulan) :
- Triwulan I: Pelaporan tanggal 1-10 April;
  - Triwulan II: Pelaporan tanggal 1-10 Juli;
  - Triwulan III: Pelaporan tanggal 1-10 Oktober;
  - Triwulan IV: Pelaporan tanggal 1-10 Januari tahun berikutnya
- Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan kegiatan penanaman modal yang menjalankan bisnis di Indonesia dilakukan oleh pelaku usaha penanaman modal domestik baik perorangan maupun badan dengan mengandalkan modal dalam negeri. Kegiatan PMDN dijalankan dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum, non badan hukum, atau usaha perseorangan, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdiri dari:
- a. Non UMK adalah usaha yang dibangun dengan modal usaha di atas Rp 10 miliar, seperti usaha besar, menengah, badan usaha luar negeri, serta kantor perwakilan, dan
  - b. Usaha menengah dan kecil (UMK) adalah usaha yang memiliki modal usaha paling banyak Rp 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang yaitu dengan jumlah aset maksimal Rp.50.000.000,- dan jumlah omset maksimal Rp.300.000.000,-

Analisis pencapaian kinerja pelayanan DPMPSTSP Kabupaten Minahasa dapat dilihat sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Minahasa (T-C.30.)

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	N/A	N/A	Point	*4	*4	*4	*4	*4	*4	*4	*4	*4	Mutu pelayanan baik
2	Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/ PMA)	N/A	N/A	Rp.	900.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	6.139.449.056.111	1.457.156.011.532	4.792.663.087.692	150.000.000.000	175.000.000.000	-
3	Nilai Realisasi Investasi di daerah	N/A	N/A	Rp.	900.000.000.000	1.000.000.000.000	80.000.000.000	80.000.000.000	91.309.000.000	201.147.433.804	99.483.868.965	80.000.000.000	80.000.000.000	-

DPMPTSP Kabupaten Minahasa mengacu pada peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pencabutan peraturan tersebut diatas dikarenakan urusan pemerintah bidang penanaman modal tidak termasuk urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga DPMPTSP Kabupaten Minahasa tidak memerlukan standar pelayanan minimal (SPM).

## 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

### 2.3.1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun peluang suatu daerah di masa yang akan datang. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta melaksanakan perumusan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, administrasi dinas dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian sesuai dengan kewenangannya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan kerjasama penanaman modal, pengendalian dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan kerjasama penanaman modal, pengendalian dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan kerjasama penanaman modal, pengendalian dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi serta pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan kerjasama penanaman modal, pengendalian dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan kerjasama dan pengawasan tugas di bidang perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan kerjasama penanaman modal, pengendalian dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pelayanan proses administrasi penerbitan perizinan dan non perizinan terpadu;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat daerah terkait di bidang perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan kerjasama penanaman modal, pengendalian, dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- h. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;

Berkaitan dengan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa dalam

menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan publik di bidang penanaman modal, DPMPTSP Kabupaten Minahasa menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan publik di bidang penanaman modal dalam rangka meningkatkan investasi untuk mendorong perekonomian nasional.

Namun pemerintah pusat melihat bahwa nilai investasi di Indonesia masih rendah diakibatkan oleh berbelitnya prosedur perizinan di berbagai sektor sehingga memandang perlu adanya pembenahan perundang-undangan untuk menghapus kerumitan pelayanan perizinan, menyederhanakan regulasi, mendorong investasi, dan menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang kemudian dicabut dan diganti oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang untuk memperbaiki beberapa kesalahan teknis dengan dampak memberikan kepastian hukum baru, mengakomodasi kebutuhan dunia usaha, serta meningkatkan daya saing investasi Indonesia. Menindaklanjuti dari Undang-Undang tersebut, di susunlah berbagai peraturan pelaksana (PP, Perpres) untuk mengatur sektor-sektor yang lebih spesifik, dan juga mengubah undang-undang lain yang tumpang tindih dan mengatur berbagai aspek untuk kemudahan berusaha dan investasi sambil tetap melindungi pekerja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dimana penyelenggaraan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh DPMPTSP dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (05 Juni 2025) mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bahwa penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah yang dilaksanakan oleh DPMPTSP wajib menggunakan Sistem OSS RBA yang dikelola oleh Pemerintah Pusat namun Pemerintah daerah diberikan peluang untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS RBA sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. Kedua PP tersebut memberikan tugas kepada pemerintah daerah untuk menyusun peraturan daerah atau peraturan kepala daerah tentang penataan kembali regulasi penanaman modal dan berusaha perlu dilakukan dalam rangka memberikan dasar hukum bagi penerbitan perizinan berusaha yang dilakukan secara terintegrasi dan elektronik serta penataan kembali perizinan dan/atau persyaratan lainnya bagi pelaku

usaha yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan guna memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan serta meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia. Maka keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) sangat diperlukan, dimana MPP merupakan tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang/jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan badan usaha milik negara/daerah dan swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman, penyusunan perkara pendelegasian kewenangan kepala daerah kepada Kepala DPMPTSP serta penetapan dan pelantikan jabatan struktural dan fungsional dalam rangka penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.

Beberapa isu-isu penting lainnya yang perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu antara lain:

1. Kebijakan penanaman modal;
2. Kerjasama penanaman modal;
3. Pelayanan publik;
4. Pengelolaan data dan informasi;
5. Realisasi, pemerataan, dan penyerapan tenaga kerja lokal dari aktivitas penanaman modal.

Sebagai lembaga daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diharapkan menjadi ujung tombak sistem pelayanan terpadu satu pintu yang dapat mengakomodasi keinginan investor/pengusaha untuk memperoleh pelayanan yang lebih mudah, murah, cepat, tepat dan akuntabel. Pembangunan sistem transformasi layanan publik yang mudah dan cepat melalui digitalisasi manajemen dan birokrasi yang adaptif bukanlah hal mudah, untuk itu diperlukan koordinasi yang baik antara DPMPTSP dengan lembaga-lembaga pemerintah daerah yang berkepentingan dalam penanaman modal namun harus didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana baik sarana fisik, kelayakan fungsi bangunan maupun dukungan teknologi informatika dengan didukung oleh kualitas etika dan kemampuan SDM.

Identifikasi isu strategis berkaitan dengan permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan DPMPTSP Kabupaten Minahasa secara umum adalah sebagaimana pada tabel 2.7.

Tabel 2.7 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

Aspek kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD	Tindak lanjut
			Internal	Eksternal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Gambaran Pelayanan OPD						
1 Kebijakan penanaman modal	➤ Ketiadaan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>- Peraturan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data potensi dan peta investasi;</li> <li>- Layanan, Kualitas dan kapasitas SDM aparatur bidang PM dalam penyediaan informasi dan penyusunan kebijakan;</li> <li>- Sarana prasarana penunjang pelayanan publik DPMPTSP Kab. Minahasa;</li> <li>- Kapasitas pembiayaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbitnya UU tentang cipta kerja tidak diikuti dengan turunannya termasuk NSPK dari kementerian teknis sehingga tidak semua jenis perizinan diakomodir dalam aplikasi OSS RBA;</li> <li>- Kontribusi investor bagi peningkatan pendapatan masyarakat;</li> <li>- Data potensi peluang investasi belum sepenuhnya disusun sesuai RDTR dan RTRW;</li> <li>- Dukungan sektor terkait dalam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak semua jenis perizinan diakomodir dalam aplikasi OSS RBA;</li> <li>- Belum adanya aturan yang disusun terkait pemberian insentif/kemudahan berinvestasi dan RUPM;</li> <li>- Belum tersedia informasi peluang usaha sektor/komoditas unggulan berbasis unggulan lokal dan insentif dan kebijakan daerah yang mendukung iklim PM;</li> <li>- Promosi peluang PM daerah, belum didukung oleh ketersediaan anggaran dan informasi peluang usaha sektor/komoditas unggulan daerah yang memberikan daya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun perda/perkada terkait dengan PMPTSP Kabupaten Minahasa;</li> <li>- Pemangkasan alur birokrasi pelayanan dan penyederhanaan prosedur pelayanan di bidang PMPTSP;</li> <li>- Menyusun RUPM, peta peluang potensi dan pemberian fasilitas/insentif PM sesuai dengan RDTR dan RTRW;</li> <li>- Pembinaan dan peningkatan layanan, kualitas dan kapasitas SDM DPMPTSP Kabupaten Minahasa;</li> <li>- Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana</li> </ul>

Aspek kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD	Tindak lanjut
			Internal	Eksternal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<p>Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p> <p>- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</p> <p>- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;</p> <p>- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang RUPM</p>		<p>penyediaan data dan informasi peluang usaha serta kebijakannya;</p> <p>- Koordinasi dengan OPD teknis dalam memfasilitasi investasi.</p>	<p>tarik ekonomi bagi penanam modal (PMDN/PMA);</p> <p>- Belum optimalnya tata kelola PM.</p>	<p>penunjang kegiatan OPD.</p>
2 Kerjasama penanaman modal	<p>➤ Penyelenggaraan fasilitasi Pemda dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK Kabupaten dengan pengusaha provinsi/ nasional</p>	<p>- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;</p> <p>- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan</p>	<p>- Data strategi promosi;</p> <p>- Data potensi investasi;</p> <p>- Layanan, Kualitas dan kapasitas SDM aparatur bidang PM dalam penyediaan informasi, pembinaan kemitraan;</p> <p>- Sarana prasarana penunjang pelayanan publik DPMPSTSP Kab. Minahasa;</p> <p>- Kapasitas pembiayaan</p>	<p>- Dukungan sektor/ kelembagaan terkait</p> <p>- Koordinasi dengan pihak terkait</p>	<p>- Ketiadaan fasilitasi Pemda dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK Kabupaten dengan pengusaha provinsi/ nasional;</p> <p>- Tidak adanya daya saing daerah;</p> <p>- Ketiadaan informasi peluang usaha sektor/ komoditas unggulan berbasis unggulan</p>	<p>- Pemangkasan alur birokrasi pelayanan dan penyederhanaan prosedur pelayanan di bidang perizinan dan investasi;</p> <p>- Peningkatan iklim investasi dengan pemberian fasilitas/ insentif PM;</p>

Aspek kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD	Tindak lanjut
			Internal	Eksternal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; - Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; - Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal			lokal dan insentif dan kebijakan daerah yang mendukung iklim PM; - Promosi peluang PM daerah, belum didukung oleh ketersediaan anggaran dan informasi peluang usaha sektor/ komoditas unggulan daerah yang memberikan daya tarik ekonomi bagi penanam modal (PMDN/PMA); - Belum optimalnya tata kelola PM.	- Mengikuti bimtek terkait promosi peluang dan potensi investasi di Kabupaten Minahasa dengan mengikuti even dan forum pameran investasi; - Melakukan sosialisasi di media online dan media lainnya untuk menghindari pihak ketiga/calo dalam pengurusan perizinan; - Peningkatan layanan, kualitas dan kapasitas SDM DPMPSTSP Kabupaten Minahasa; - Evaluasi SOP dan SP efektifitas kegiatan terhadap adanya perubahan-perubahan regulasi berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang

Aspek kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD	Tindak lanjut
			Internal	Eksternal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<p>Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal;</p> <p>- Peraturan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di daerah;</p> <p>- SOP dan SP DPMPTSP Kabupaten Minahasa sebagai panduan dalam melaksanakan mekanisme pelayanan perizinan, non perizinan bidang PM.</p>				<p>ditetapkan oleh pemerintah pusat;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana penunjang kegiatan OPD;</li> <li>- Implementasi ASN Berakhlak dan penerapan 5S (senyum salam sapa sopan santun).</li> </ul>

Aspek kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD	Tindak lanjut
			Internal	Eksternal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3 Pelayanan publik	➤ Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Layanan, Kualitas dan kapasitas SDM Aparatur minim;</li> <li>- Sarana prasarana kerja dan fasilitas pelayanan;</li> <li>- Belum optimalnya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang PM.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan sektor terkait dalam pelayanan publik;</li> <li>- Beberapa perizinan masih ada yang dilaksanakan oleh OPD teknis;</li> <li>- Belum terintegrasi Sistem Informasi pelayanan di tiap kementerian/ lembaga;</li> <li>- Koordinasi dan sinkronisasi perangkat daerah teknis belum optimal terkait OSS RBA.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompetensi SDM Aparatur belum selaras dengan peta jabatan dan analisa jabatan, bukan hanya secara akademis namun secara etika melayani masyarakat;</li> <li>- Adaptasi dengan manajemen ASN karena perubahan sistem kerja dan penyetaraan jabatan;</li> <li>- Sarana dan prasarana yang ada belum cukup dalam menunjang pelayanan publik (mobil operasional, papan nama, plakat penunjuk arah ruang laktasi, ruang pengaduan, dll);</li> <li>- Adanya perbedaan peraturan pelaksanaan PTSP antara BKPM RI dengan Kemendagri;</li> <li>- Lambatnya koneksi jaringan internet mempengaruhi sistem informasi pelayanan secara online;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan peningkatan layanan, kualitas dan kapasitas SDM DPMPTSP Kabupaten Minahasa;</li> <li>- Mengikuti bimbingan teknis terkait kapasitas petugas layanan dalam memberikan pelayanan dengan ramah, sopan serta mengembangkan inovasi layanan publik secara mobile sehingga mampu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;</li> <li>- Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana penunjang kegiatan OPD;</li> <li>- Pemangkasan alur birokrasi pelayanan dan penyederhanaan prosedur pelayanan di bidang perizinan</li> </ul>

Aspek kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD	Tindak lanjut
			Internal	Eksternal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; - Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; - Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik; - PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik; - Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya sistem pelayanan perizinan elektronik dan mobile (tidak terupdate sistem informasi);</li> <li>- Belum optimalnya tata kelola PM;</li> <li>- Belum terbentuknya MPP yang mencakup sektor layanan publik disegala bidang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dan investasi;</li> <li>- Inovasi layanan memberikan pelayanan dengan ramah, sopan serta mengembangkan inovasi layanan publik secara mobile sehingga mampu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat seperti membuat pelayanan di desa, kelurahan hingga kecamatan melalui gerai perizinan;</li> <li>- Sosialisasi OSS RBA;</li> <li>- Evaluasi SOP dan SP efektifitas kegiatan terhadap adanya perubahan-perubahan regulasi;</li> <li>- Implementasi ASN Berakhlak dan penerapan 5S (senyum salam sapa sopan santun);</li> <li>- Implementasi MPP fisik maupun digital.</li> </ul>

Aspek kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD	Tindak lanjut
			Internal	Eksternal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; - Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik; - Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; - Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;				

Aspek kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD	Tindak lanjut
			Internal	Eksternal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan mal Pelayanan Publik;</li> <li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;</li> <li>- SOP dan SP DPMPTSP Kabupaten Minahasa sebagai panduan dalam melaksanakan mekanisme pelayanan perizinan, non perizinan bidang PM.</li> </ul>				
4 Pengelolaan data dan	➤ Pelayanan penyediaan data	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun	- Layanan, Kualitas, Kapasitas SDM	- Penyampaian LKPM dari	- Integrasi database berbasis NIK dari	- Mengusulkan penambahan

Aspek kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD	Tindak lanjut
			Internal	Eksternal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
informasi	dan informasi	<p>2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan</li> </ul>	<p>aparatur bidang penanaman modal dalam penyediaan layanan PM;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana prasarana kerja terutama infrastruktur pendukung ;</li> <li>- Kapasitas pembiayaan.</li> </ul>	<p>investor;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyampaian data/informasi PM</li> <li>- Belum efektifnya peran koordinasi antar PD tim teknis;</li> <li>- Anggaran diklat</li> </ul>	<p>dukcapil sebagai bahan pendaftaran permohonan perizinan masih terkendala;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana dan prasarana yang ada belum cukup dalam menunjang pelayanan publik terutama teknologi informasi (termasuk jaringan internet);</li> <li>- Belum optimalnya tata kelola PM.</li> </ul>	<p>sarana dan prasarana penunjang kegiatan OPD;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan media informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang applicable dan accessible sesuai dengan perkembangan teknologi;</li> <li>- Mengupdating system semi online ke online full/ penerapan teknologi informasi;</li> <li>- Pembinaan dan peningkatan layanan, kualitas dan kapasitas SDM DPMPTSP Kabupaten Minahasa melalui bimtek terkait pelayanan publik;</li> <li>- Melakukan sosialisasi di media online dan media lainnya untuk menghindari pihak ketiga/calor dalam pengurusan</li> </ul>

Aspek kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD	Tindak lanjut
			Internal	Eksternal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Perizinan Berusaha di Daerah; -Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; -Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission); -SOP dan SP DPMPTSP Kabupaten Minahasa sebagai panduan dalam melaksanakan mekanisme pelayanan perizinan, non perizinan bidang				perizinan; - Inovasi layanan publik secara mobile untuk mendukung peningkatan mutu layanan perizinan dan non perizinan di bidang PM; - Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pelayanan perizinan berusaha dan investasi; - Pemantauan, pembinaan dan pendampingan terhadap kepatuhan dan ketaatan pelaku usaha dalam penyampaian LKPM; - Evaluasi SOP dan SP efektifitas kegiatan terhadap adanya perubahan-perubahan regulasi.

Aspek kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD	Tindak lanjut
			Internal	Eksternal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		PM.				
5. Realisasi, pemerataan, dan penyerapan tenaga kerja lokal dari aktivitas penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Jumlah Investor berskala provinsi/nasional (PMDN/PMA)</li> <li>➢ Penyerapan tenaga kerja lokal dari PMDN/PMA</li> <li>➢ Jumlah dan realisasi investasi sektor primer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daya saing sektor/komoditas unggulan daerah dari aspek kebijakan PM;</li> <li>- Ketersediaan informasi peluang usaha sektor/komoditas unggulan daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemitraan usaha mikro dan kecil dengan usaha menengah/ besar dan berkembang menjadi masih rendah;</li> <li>- Daya saing sektor/komoditas unggulan daerah dari aspek infrastruktur pendukung penanaman modal sektor/komoditas unggulan daerah (termasuk tata ruangnya);</li> <li>- Kepedulian pelaku usaha minim untuk melaporkan nilai realisasi investasi melalui LKPM;</li> <li>- Kondisi perekonomian global,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya data informasi mengenai pengembangan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah menjadi Potensi Investasi Regional melalui data potensi PM;</li> <li>- Terbatasnya jumlah realisasi investasi baik PMDN maupun PMA untuk mendukung peningkatan kualitas ekonomi daerah;</li> <li>- Minimnya pengawalan investasi dan pengawasan PM;</li> <li>- Tidak adanya daya tarik relisasi investasi berskala nasional;</li> <li>- Masih terbatasnya jumlah penyerapan tenaga kerja lokal dari aktivitas penanaman modal (PMA/PMDN);</li> <li>- Masih terbatasnya jumlah investor dan nilai investasi di sektor primer;</li> <li>- Tingkat kesadaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dengan instansi terkait untuk menyusun data potensi peluang investasi dan data eksisting perizinan dan non perizinan yang up to date, valid dan terukur;</li> <li>- Peningkatan iklim investasi dengan pemberian fasilitas/ insentif PM;</li> <li>- optimalnya pelaksanaan kewenangan pelayanan perizinan berusaha dan investasi;</li> <li>- Pemantauan, pembinaan dan pendampingan terhadap kepatuhan dan ketaatan pelaku usaha dalam penyampaian LKPM;</li> <li>- Sosialisasi OSS RBA;</li> <li>- Mengusulkan penambahan</li> </ul>

Aspek kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD	Tindak lanjut
			Internal	Eksternal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;</li> <li>- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;</li> <li>- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> </ul>		nasional, dan daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>pelaku usaha minim dalam melaporkan hasil kegiatannya di LKPM;</li> <li>- Belum optimalnya tata kelola PM.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>sarana dan prasarana penunjang kegiatan OPD;</li> <li>- Implementasi ASN Berakhlak dan penerapan 5S (senyum salam sapa sopan santun).</li> </ul>

Aspek kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD	Tindak lanjut
			Internal	Eksternal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;</li> <li>- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission);</li> <li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang</li> </ul>				

Aspek kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD	Tindak lanjut
			Internal	Eksternal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.				

### 2.3.2. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional

Sebagai lembaga daerah DPMPTSP Kabupaten Minahasa diharapkan menjadi ujung tombak yang dapat mengakomodasi keinginan pelaku usaha/ investor memperoleh pelayanan lebih mudah, murah cepat dan tepat secara sederhana, mudah, akuntabel, ramah dan tepat waktu (SMART) yang mendukung visi “Minahasa daerah pariwisata yang maju dan sejahtera” dan misi “Meningkatkan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mewujudkan ekonomi yang tangguh” dan “Memantapkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel berbasis digitalisasi dan inovatif untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima”.

Sinergitas kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa dari tingkat pusat, provinsi terhadap norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) maupun standar pelayanan minimal (SPM) merupakan upaya dalam mengawal pembangunan di Kabupaten yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis (renstra). Secara garis besar pencapaian visi nasional fokus mendatangkan investasi ke Indonesia karena dapat membuka lapangan pekerjaan dengan memangkas habis hal-hal yang menghambat investasi baik itu perizinan yang lambat, berbelit-belit dan yang ada punglinya serta reformasi birokrasi yang sederhana, lincah dengan cara memangkas birokrasi yang tidak efisien yang pada akhirnya kunci dalam menarik investasi sehingga mempercepat proses perizinan untuk pelayanan prima berkualitas.

Tabel 2.8 Visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pembangunan

Kementerian Investasi/ BKPM		DPMPTSPD Provinsi Sulawesi Utara	DPMPTSP Kabupaten Minahasa
Visi	Terwujudnya Penanaman Modal Yang Tinggi Dan Berkualitas Untuk Menuju Indonesia Emas 2045	Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan	Minahasa Daerah Pariwisata yang Maju dan Sejahtera
Misi	Mengakselerasi Peningkatan Penanaman Modal untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	3. Membangun perekonomian daerah	2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mewujudkan ekonomi yang tangguh
		7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	3. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel berbasis digitalisasi dan inovatif untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima
Tujuan	Meningkatnya Penanaman Modal yang Berfokus pada Sektor Prioritas termasuk Hilirisasi, Orientasi Ekspor, dan Berbasis Kewilayahan	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif
Sasaran	1. Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Bernilai Tambah, Inklusif, Berorientasi Ekspor, dan Merata	Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat	1. Meningkatnya pertumbuhan penanaman modal
	2. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang Bersih dan Efektif, serta Pelayanan Penanaman Modal yang Prima		2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kepuasan stakeholder terhadap pelayanan Perangkat Daerah
Strategi		1. Meningkatkan inovasi daerah untuk menarik investasi	1. Penyusunan kebijakan perencanaan PM
			2. Pelaksanaan kegiatan promosi yang fokus dan terarah
			3. Penguatan kualitas sosialisai, pelayanan dan penyelesaian masalah perizinan berbasis resiko melalui sistem OSS dan LKPM
			4. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi kinerja aparatur pelayanan publik

### 2.3.3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan

Beberapa faktor tantangan yang harus dihadapi dalam meningkatkan pelayanan DPMPSTSP Kabupaten Minahasa di masa yang akan datang diuraikan sebagai berikut :

1. Tingginya harapan masyarakat atas kualitas pelayanan publik serta terhadap peran investasi dalam mengurangi pengangguran dan pemerataan pembangunan;
2. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM DPMPSTSP Kabupaten Minahasa dalam memberikan pelayanan dengan ramah, sopan serta mengembangkan inovasi layanan publik secara mobile sehingga mampu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
3. Terealisasinya pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Minahasa melalui kerjasama dengan instansi, lembaga, BUMN, BUMD dan atau swasta yang memberikan pelayanan publik bagi masyarakat;
4. Kebijakan dari beberapa kementerian /lembaga terkait yang tidak sinkron, tumpang tindih dan sering berubah;
5. Iklim investasi yang belum kondusif memerlukan pengkajian dan implementasi kebijakan baru di daerah terutama menyangkut perbaikan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah terkait dengan penyelenggaraan perizinan bidang penanaman modal di daerah, perbaikan pelayanan, penyederhanaan birokrasi, efisiensi pembiayaan investasi, tata cara pengenaan sanksi administratif perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan bidang penanaman modal hingga penyediaan infrastruktur;
6. Penyusunan kajian akademik dan peraturan daerah tentang penyusunan RUPM, pemberian insentif dan kemudahan berusaha;
7. Pelaksanaan kegiatan promosi investasi melalui temu investor, podcast, pameran, siaran radio, pembuatan video serta pembuatan booklet dan leaflet;
8. Kesadaran pelaku usaha/ investor terkait kewajiban pelaporan penanaman modal yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dalam percepatan realisasi investasi dengan melakukan identifikasi permasalahan penanaman modal dan penyelesaian permasalahan melalui kegiatan visitasi dan pendampingan;
9. Koordinasi dan sinkronisasi DPMPSTSP dengan perangkat daerah teknis belum optimal dan masih belum sadar terkait kewenangan dan kewajiban pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission) dalam melakukan verifikasi perizinan berusaha yang menjadi kewenangan daerah;
10. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan inspeksi pengawasan perizinan berusaha secara terintegrasi dengan melibatkan perangkat daerah teknis untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan pelaksanaan kegiatan usaha;

11. Penyederhanaan persyaratan PBG;
12. Membentuk Asosiasi Arsitek Indonesia (AAI);
13. Integrasi sistem data antar perangkat daerah dan BPS;
14. Adanya alih media arsip fisik menjadi arsip digital;
15. Penyesuaian terhadap SOP dan SP serta berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat;
16. Pengembangan sistem pelayanan konsultasi, informasi dan pengaduan agar memudahkan pelayanan terhadap masyarakat;
17. Rawan akan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sedangkan beberapa peluang yang ada dalam melaksanakan tugas peningkatan pelayanan DPMPTSP Kabupaten Minahasa adalah:

1. Potensi lahan investasi melimpah belum dimanfaatkan sebagai modal daerah untuk menarik minat investor;
2. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan wewenang untuk meningkatkan pelayanan publik secara professional;
3. Tersedianya kebijakan/ dasar hukum dari pemerintah pusat dalam memberikan kewenangan kepala daerah untuk mengembangkan akses percepatan investasi dan penyederhanaan pelayanan perizinan;
4. Penerapan pelayanan berbasis teknologi informasi untuk memaksimalkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengakselerasikan, berinovasi dan mengembangkan pelayanan perizinan penanaman modal dan pengenalan potensi investasi;
5. Kerjasama dan koordinasi antar daerah, instansi pemerintah, dunia usaha maupun dengan stakeholder terkait untuk pengelolaan potensi ekonomi strategis;
6. Adanya anggaran sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan agar tepat waktu;
7. Dukungan dari masyarakat, OPD dan mitra kerja yang berperan aktif dalam berbagai pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Minahasa.

#### 2.3.4. Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Agar tujuan yang telah ditetapkan tersebut dapat tercapai tentunya DPMPTSP Kabupaten Minahasa perlu menyiapkan langkah-langkah strategis, yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang khususnya bidang teknologi informasi guna mendukung peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan publik bidang perizinan dan penanaman modal;
2. Ketersediaan ruang arsip;

3. Terselenggaranya pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Minahasa melalui kerjasama dengan instansi, lembaga, BUMN, BUMD dan atau swasta yang memberikan pelayanan publik bagi masyarakat;
4. Meningkatkan kapasitas, kualitas dan kapabilitas DPMPTSP Kabupaten Minahasa terkait layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kalangan dunia usaha/ investor melalui kegiatan bimbingan teknis maupun pendidikan latihan (diklat) dari segi kemampuan akademik maupun etika;
5. Menyusun ketentuan dan kajian peraturan perundang-undangan DPMPTSP Kabupaten Minahasa secara utuh, utamanya untuk melaksanakan urusan penanaman modal sebagai salah satu alat dalam pemrosesan permohonan perizinan dan investasi daerah yang mengikuti dinamika dunia usaha sehingga diharapkan semua izin sudah ada regulasinya dan untuk memacu perkembangan potensi investasi melalui kemudahan berusaha;
6. Optimalisasi pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi secara online dengan mengembangkan sistem berbasis teknologi informasi dan data dalam penerapan satu pintu untuk upaya pemberian informasi, penanganan konsultasi dan pengaduan terhadap izin yang diterbitkan DPMPTSP Kabupaten Minahasa dalam pelaksanaan e-government urusan pelayanan publik bidang perizinan dan penanaman modal;
7. Meningkatkan investasi dengan menciptakan iklim investasi yang nyaman dan kemudahan berbisnis dengan penyediaan data potensi sektor investasi yang akurat, pemberian fasilitas/insentif penanaman modal, promosi peluang dan potensi investasi dengan mengikuti even dan forum pameran investasi, sehingga memudahkan bagi calon investor yang akan menanamkan modal;
8. Koordinasi, pembinaan, pengawasan, harmonisasi dan sosialisasi kepada investor/ pelaku usaha guna meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan bidang penanaman modal baik terkait pelaksanaan usaha maupun dalam pelaporan (LKPM) yang dapat menunjang pembangunan perekonomian di Kabupaten Minahasa;
9. Bekerjasama dengan pemerintah pusat, provinsi dan daerah terkait promosi kegiatan festival, kultural dan sebagainya yang berlokasi di Kabupaten Minahasa, dan dapat berpartisipasi ikut pameran di suatu kota atau negara dengan menampilkan produk-produk khas Kabupaten Minahasa;
10. Pengendalian dan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW dan RDTR serta zonasi dengan menerbitkan perizinan dan non perizinan yang mempertimbangkan daya dukung lahan dan lingkungan;

11. Membuka kesempatan kerja, melalui penguatan peran tradeable sectors yang bertumpu pada industri kecil menengah (IKM) dan pedagang pasar tradisional;
12. Pelayanan publik perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal secara sederhana, mudah, akuntabel, ramah dan tepat waktu (SMART) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
13. Penguatan kapasitas Sistem OSS dan LKPM;
14. Penguatan Kualitas SDM Kinerja Pelayanan Publik;
15. Peningkatan akuntabilitas pelayanan publik secara profesional.

Arah Kebijakan:

1. Pengembangan sistem teknologi informasi;
2. Penyiapan sarana jaringan dan infrastruktur berbasis teknologi informasi secara online;
3. Merumuskan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal dan perijinan;
4. Mewajibkan perusahaan melaporkan lowongan kerja dan hasil kegiatannya;
5. Meningkatkan pemantauan dan pengawasan investasi;
6. Melaksanakan pengembangan kualitas SDM Aparatur dengan mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi serta kursus teknis bidang pelayanan publik;
7. Implementasi reformasi birokrasi dan SAKIP;
8. Penataan regulasi daerah tentang kepastian hukum pelayanan publik bidang perizinan dan investasi .

#### 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan untuk:

- 1) mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan yang telah ditetapkan. Hasil review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026 yang dilakukan melalui proses;
- 2) membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan yang dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target atau tolok ukur dan dana yang dibutuhkan;
- 3) penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD agar tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Minahasa tercapai sesuai dengan terget kinerja yang ditetapkan, dibutuhkan pemahaman dan kesungguhan pengelola anggaran dalam melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen yang disusun sebagai pedoman seluruh perangkat daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif, sekaligus acuan dalam menyusun rencana kerja anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) serta proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2026 dimana RKPD merupakan penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional yang berfungsi untuk memelihara konsistensi antara capaian dan tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah, maka penyusunan renja DPMPTSP Kabupaten Minahasa harus memperhatikan kebutuhan alokasi anggaran guna mendukung kelancaran pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan walaupun terdapat beberapa perubahan penambahan atau pengurangan berdasarkan dokumen rancangan awal renja.

Adapun tahapan-tahapan review yang dilakukan sebagai berikut:

1. Terdapat perubahan nomenklatur pada beberapa Kegiatan dan Subkegiatan beserta indikatornya yang telah terakomodir di SIPD. Hal ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tanggal 23 Juni 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Adanya perubahan peraturan perizinan bidang penanaman modal di tingkat nasional;
3. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD;
4. Membandingkan dan merumuskan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan dalam pencapaian kinerja DPMPTSP;
5. Menuangkan data dalam bentuk tabel matriks sehingga mempermudah dalam mengolah dan menyajikan data.

Penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

#### 2.4.1. Perbandingan antara ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

Berdasarkan RPJPD Kabupaten Minahasa Tahun 2005-2025 dan Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Minahasa pada DPMPTSP Kabupaten Minahasa yang akan dicapai Tahun 2026 sebanyak 6

(enam) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) subkegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota:
  - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
    - 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
    - 1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
    - 1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
    - 1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - 1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - 1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - 1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
    - 1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - 1.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - 1.4.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - 1.5.1 Pengadaan Mebel
    - 1.5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - 1.5.3 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
    - 1.5.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - 1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - 1.6.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 1.6.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal:
  - 2.1 Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
    - 2.1.1 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota
3. Program Promosi Penanaman Modal:
  - 3.1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
    - 3.1.1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
    - 3.1.2 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota
4. Program Pelayanan Penanaman Modal:
  - 4.1 Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
    - 4.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah
    - 4.1.2 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik
    - 4.1.3 Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
    - 4.1.4 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal:
  - 5.1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
    - 5.1.1 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
    - 5.1.2 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
    - 5.1.3 Pengawasan Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal:
  - 6.1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
    - 6.1.1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

#### 2.4.2 Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan

Proses tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan upaya pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Adapun hal tersebut dapat diwujudkan melalui :

1. Penggunaan dana APBD dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu adalah untuk meningkatkan perekonomian dengan cara meningkatkan investasi yang dapat menunjang pembangunan perekonomian sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Minahasa;
2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel;
3. Penyesuaian pagu pada rancangan awal dan indikatif dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan prioritas anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh pada pelayanan dasar masyarakat seperti MDGs (Millenium Developmnet Goals), maupun pelaksanaan-pelaksanaan program prioritas untuk mendukung visi dan misi kepala daerah dilaksanakan dengan prinsip proporsional, pemerataan dan penyeimbang;
4. Membuat sebuah regulasi yang meninjau kembali percepatan kemudahan berusaha yang bersinergi antara pemerintahan pusat, provinsi dan kab/kota.
5. Memfasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota demi pengembangan iklim PM.

Penyesuaian RKPD dengan analisis kebutuhan program dan kegiatan berikut besaran pendanaannya dapat terlihat pada tabel diuraikan sebagaimana tabel 2.9

Tabel 2.9 Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026  
Kabupaten Minahasa (T-C.31.)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar				4.988.853.915	Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar				8.037.199.478	
2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				4.988.853.915	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				8.037.199.478	2.18
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kab. Minahasa	Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2 %	832.500.000	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kab. Minahasa	Realisasi total terhadap target investasi	140 M 82,35%	19.999.640	2.18.02
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa	Terlaksananya Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	12.500.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa	Jumlah dokumen penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang pengembangan iklim penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten	14 Dokumen	19.999.640	2.18.02.2.01
2 18 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Minahasa	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	5.000.000	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Minahasa	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	0	2 18 02 2.01 01
2 18 02 2.01 03	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	6 Dokumen	5.000.000	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	12 Dokumen	19.999.640	2 18 02 2.01 03
2 18 02 2.01 04	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Kab. Minahasa	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 Dokumen	2.500.000	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Kab. Minahasa	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 Dokumen	0	2 18 02 2.01 04
2 18 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa	Tersedianya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	750.000.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa	Tersedianya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	2 18 02 2.02
2 18 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	2 18 02 2.02 01

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2 18 02 2.02 03	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Kab. Minahasa	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1 Daerah	200.000.000	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Kab. Minahasa	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1 Daerah	0	2 18 02 2.02 03
2 18 02 2.02 04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	500.000.000	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	2 18 02 2.02 04
2 18 02 3.03	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur	Kab. Minahasa	Tercapainya Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur	100 %	15.000.000						
2 18 02 3.03.01	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam	Kab. Minahasa	Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Dilaksanakan	10 Badan Usaha	15.000.000						
2 18 02 3.04	Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa	Tercapainya Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	100 %	15.000.000						
2 18 02 3.04.01	Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa	Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	10 Badan Usaha	15.000.000						
2 18 02 3.05	Kemitraan Usaha Nasional	Kab. Minahasa	Tercapainya Jumlah kemitraan usaha nasional	100 %	15.000.000						
2 18 02 3.05.01	Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	Kab. Minahasa	Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	10 UMKM	15.000.000						
2 18 02 3.06	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.	Kab. Minahasa	Terlaksananya Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	25.000.000						
2 18 02 3.06.01	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka	Kab. Minahasa	Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan	1 Laporan	25.000.000						

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/ Kota		Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan								
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Kab. Min & tersebar	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	24 Investor	250.000.000	Program Promosi Penanaman Modal	Kab. Min & tersebar	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	16%	69.800.000	2.18.03
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Min & tersebar	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	70 Pengunjung	250.000.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Min & tersebar	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	16 Dokumen	69.800.000	2 18 03 2.01
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Min & tersebar	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	3 Dokumen	200.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Min & tersebar	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	3 Dokumen	0	2 18 03 2.01 02
2 18 03 2.01 03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Min & tersebar	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/ Kota	1 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Min & tersebar	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/ Kota	1 Dokumen	69.800.000	2 18 03 2.01 03
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Kab. Min	Nilai realisasi penanaman modal bidang perizinan	80.000.000.000	170.000.000	Program Pelayanan Penanaman Modal	Kab. Min	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	16,36%	19.000.000	2.18.04
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Min	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	3 Laporan	170.000.000	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Min	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	56	19.000.000	2 18 04 2.01
2 18 04 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Min	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten	10 Investor	30.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Min	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten	4 Dokumen	10.000.000	2 18 04 2.01 05
2 18 04 2.01 06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Min	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 / Pelaku Usaha	100.000.000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Min	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	150 Orang/Pelaku Usaha	1.000.000	2 18 04 2.01 06
2 18 04 2.01 07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan	Kab. Min Layanan konsultasi	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan	50 Orang Pelaku Usaha	30.000.000	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan	Kab. Min	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi	100 Orang Pelaku Usaha	3.000.000	2 18 04 2.01

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	berusaha berbasis risiko	perizinan berusaha berbasis risiko	Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			berusaha berbasis risiko		Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			07
2 18 04 2.01 08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Min & tersebar	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko lintas daerah kab/ kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	120 Kegiatan Usaha	10.000.000	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Min & tersebar	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko lintas daerah kab/ kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	100 Kegiatan Usaha	5.000.000	2 18 04 2.01 08
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Minahasa	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang masuk di Kabupaten Minahasa	15 Laporan	448.700.000	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Minahasa	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	10,24%	39.999.760	2.18.05
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa	Jumlah Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	3 Laporan	448.700.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa	Jumlah Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	4 Laporan	39.999.760	2 18 05 2.01
2 18 05 2.01 04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Minahasa	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	8 Kegiatan Usaha	83.000.000	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Minahasa	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	7 Kegiatan Usaha	5.000.000	2 18 05 2.01 04
2 18 05 2.01 05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Minahasa	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	205 Pelaku Usaha	210.700.000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Minahasa	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	175 Pelaku Usaha	19.999.760	2 18 05 2.01 05
2 18 05 2.01 06	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Minahasa	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	13 Kegiatan Usaha	155.000.000	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Minahasa	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan	30 Kegiatan Usaha	15.000.000	2 18 05 2.01 06

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Berusaha			
2 18 06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Kab. Minahasa	Data potensi sumber daya, sarana dan prasarana pendukung investasi	1 Dokumen	100.000.000	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Kab. Minahasa	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	20%	1.000.000	2 18 06
2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	100.000.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa	Jumlah data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sinkron	12 Laporan	1.000.000	2 18 06 2.01
2 18 06 2.01 02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Minahasa	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	16 Dokumen	100.000.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Minahasa	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	1.000.000	2 18 06 2.01 02
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	DPMPTSP	1. Nilai SAKIP	A	3.187.653.915	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	DPMPTSP	1. Nilai SAKIP (predikat)	B	7.887.400.078	2.18.01
		DPMPTSP	2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	83			DPMPTSP	2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82		
2 18 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang ditetapkan	14 Dokumen	5.000.000	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	DPMPTSP	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang ditetapkan	15 Dokumen	5.500.000	2 18 01 2.01
2 18 01 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	2.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	2.500.000	2 18 01 2.01.01
2 18 01 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	500.000	2 18 01 2.01.02
2 18 01 2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	500.000	2 18 01 2.01.03
2 18 01 2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	500.000	2 18 01 2.01.04

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2 18 01 2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	DPMPPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DPMPPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	500.000	2 18 01 2.01.0 5
2 18 01 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPPTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPPTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	500.000	2 18 01 2.01.0 6
2 18 01 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPPTSP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPPTSP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	500.000	2 18 01 2.01.0 7
2 18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMPPTSP	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Teradministrasi	100%	2.251.643.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMPPTSP	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Teradministrasi	100%	2.090.963.000	2 18 01 2.02
2 18 01 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPPTSP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 ASN	2.251.643.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPPTSP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 ASN	2.090.963.000	2 18 01 2.02.0 1
2 18 01 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPMPPTSP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPMPPTSP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	0	2 18 01 2.02.0 2
2 18 01 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	DPMPPTSP	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	DPMPPTSP	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	2 18 01 2.02.0 3
2 18 01 2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DPMPPTSP	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DPMPPTSP	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	0	2 18 01 2.02.0 4
2 18 01 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMPPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMPPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	2 18 01 2.02.0 5
2 18 01 2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	DPMPPTSP	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	DPMPPTSP	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0	0	2 18 01 2.02.0 6
2 18 01 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	DPMPPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	12 Laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	DPMPPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	0	0	2 18 01 2.02.0 7

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Semesteran SKPD		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Triwulanan/Semesteran SKPD		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
2 18 01 2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	0	2 18 01 2.02.08
2 18 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DPMPTSP	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terfasilitasi	95%	3.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DPMPTSP	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terfasilitasi	95%	0	2 18 01 2.03
2 18 01 2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DPMPTSP	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DPMPTSP	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	2 18 01 2.03.01
2 18 01 2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	2 18 01 2.03.02
2 18 01 2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	0	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0	0	2 18 01 2.03.03
2 18 01 2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.000.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	2 18 01 2.03.04
2 18 01 2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	2 18 01 2.03.05
2 18 01 2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	2 18 01 2.03.06
2 18 01 2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	2 18 01 2.03.07
2 18 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Min & tersebar	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terfasilitasi	95%	230.600.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Min & tersebar	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terfasilitasi	95%	42.500.000	2 18 01 2.05
2 18 01 2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Min	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	20 Unit	10.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Min	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	20 Unit	0	2 18 01 2.05.01

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2 18 01 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Min & tersebar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	96 Paket	65.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPMPTSP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	96 Paket	42.500.000	2 18 01 2.05.02
2 18 01 2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Min & tersebar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	1.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Min & tersebar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	0	2 18 01 2.05.03
2 18 01 2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Min & tersebar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	3.600.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Min & tersebar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	0	2 18 01 2.05.04
2 18 01 2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Min & tersebar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	1.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Min & tersebar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	0	2 18 01 2.05.05
2 18 01 2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Min & tersebar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	45.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Min & tersebar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	0	2 18 01 2.05.09
2 18 01 2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Min & tersebar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Min & tersebar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	0	2 18 01 2.05.10
2 18 01 2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Min & tersebar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	55.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Min & tersebar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	0	2 18 01 2.05.11
2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMPTSP	Persentase Administrasi Umum yang Terfasilitasi	95 %	265.020.915	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMPTSP	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terfasilitasi	95 %	121.187.178	2 18 01 2.06
2 18 01 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	24.020.915	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.425.620	2 18 01 2.06.01
2 18 01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	25.766.800	2 18 01 2.06.02
2 18 01 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMPTSP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMPTSP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	13.378.758	2 18 01 2.06.03
2 18 01 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	2 18 01 2.06.04
2 18 01 2.06.05	Penyediaan Barang	DPMPTSP	Jumlah Paket Barang	12 Paket	5.500.000	Penyediaan Barang	DPMPTSP	Jumlah Paket Barang	12 Paket	3.000.000	2 18

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Cetakan dan Penggandaan		Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			Cetakan dan Penggandaan		Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			01 2.06.0 5
2 18 01 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0	0	2 18 01 2.06.0 6
2 18 01 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMPTSP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	30.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMPTSP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0	2 18 01 2.06.0 8
2 18 01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersebar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersebar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	77.616.000	2 18 01 2.06.0 9
2 18 01 2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	500.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	0	2 18 01 2.06.1 0
2 18 01 2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	0	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	0	2 18 01 2.06.1 1
2 18 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMPTSP	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai RKBMD	95 %	100.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMPTSP	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai RKBMD	95 %	5.186.330.78 0	2 18 01 2.07
2 18 01 2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMPTSP	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMPTSP	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	2 18 01 2.07.0 1
2 18 01 2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPTSP	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPTSP	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	2 18 01 2.07.0 2
2 18 01 2.07.05	Pengadaan Mebel	DPMPTSP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	0	Pengadaan Mebel	DPMPTSP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	98.945.340	2 18 01 2.07.0 5
2 18 01 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	100.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	88.905.440	2 18 01 2.07.0 6
2 18 01 2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	4.998.480.00 0	2 18 01 2.07.0 9
2 18 01 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	DPMPTSP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung	Unit	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana	DPMPTSP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung	Unit	0	2 18 01

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kantor atau Bangunan Lainnya		Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			2.07.1 0
2 18 01 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	2 18 01 2.07.1 1
2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98 %	240.200.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98 %	397.860.200	2 18 01 2.08
2 18 01 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	25.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.750.000	2 18 01 2.08.0 1
2 18 01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	138.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	141.598.200	2 18 01 2.08.0 2
2 18 01 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	0	2 18 01 2.08.0 3
2 18 01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	67.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	250.512.000	2 18 01 2.08.0 4
2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara sesuai RKPBM	93 %	92.190.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara sesuai RKPBM	93 %	43.058.920	2 18 01 2.09
2 18 01 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMPTSP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	42.190.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMPTSP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	38.480.000	2 18 01 2.09.0 1
2 18 01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPTSP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPTSP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	0	2 18 01 2.09.0 2
2 18 01 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	DPMPTSP	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	0	Pemeliharaan Mebel	DPMPTSP	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	0	2 18 01 2.09.0 5

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2 18 01 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	50.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	0	2 18 01 2.09.06
2 18 01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	0	2 18 01 2.09.09
2 18 01 2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	0	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	0	2 18 01 2.09.10
2 18 01 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	4.578.920	2 18 01 2.09.11

#### 2.4.3 Temuan yang diperoleh dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD

Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan mulai dari penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra PD, Renja-PD dan RKPD sistematis dan substansi sudah mengacu pada peraturan Undang- Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, namun belum sempurna. Pada penyusunan Renja-PD menampung usulan program dan kegiatan dari PD dan juga usulan program dan kegiatan secara partisipatif yaitu menjaring usulan program dan kegiatan dari masyarakat (bottom-up) atau stakeholder melalui mekanisme musrenbang dan forum PD, dari musrenbang dan forum PD inilah usulan program dan kegiatan di rekapitulasi dalam Renja-PD, kemudian dari Renja-PD usulan program dan kegiatan di adopsi sehingga tersusun Rancangan Awal RKPD.

Pada rancangan awal Renja besaran pagu indikatif tahun 2026 mencapai Rp. 4.988.853.915,- akan tetapi hasil analisis kebutuhan disesuaikan menjadi Rp. 8.037.199.478,- Penyesuaian ini dikarenakan akan diadakannya pembangunan MPP fisik. Penyesuaian RKPD dengan analisis kebutuhan program dan kegiatan berikut besaran pendanaannya terdiri dari 6 (enam) program, 12 (duabelas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) subkegiatan, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Pagu indikatif pada ranwal Renja 2026 sebesar Rp 3.187.653.915,- sedangkan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp 7.887.400.078,- sumber pendanaannya terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU)  
Perbedaan ini dikarenakan pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan MPP
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal  
Pagu indikatif pada ranwal Renja 2026 sebesar Rp 832.500.000,- sedangkan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp 19.999.640,-
3. Program Promosi Penanaman Modal  
Pagu indikatif pada ranwal Renja 2026 sebesar Rp 250.000.000,- sedangkan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp 69.800.000,- sumber pendanaannya terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU)  
Kegiatan yang dilaksanakan di program ini adalah hanya mengikuti kegiatan pameran investasi
4. Program Pelayanan Penanaman Modal  
Pagu indikatif pada ranwal Renja 2026 sebesar Rp 170.000.000,- sedangkan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp 19.000.000,- sumber pendanaannya terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU)
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal  
Pagu indikatif pada ranwal Renja 2026 sebesar Rp 448.700.000,- sedangkan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp 39.999.760,- sumber pendanaannya terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU)  
Kegiatan yang dilaksanakan program ini adalah menyelenggarakan bimtek kepada pelaku usaha dan cara pembuatan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang merupakan kewajiban bagi pelaku usaha dengan skala usaha kecil, menengah dan besar, penyelesaian masalah dan pengawasan yang dihadapi oleh pelaku usaha
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal  
Pagu indikatif pada ranwal Renja 2026 sebesar Rp 100.000.000,- sedangkan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp 1.000.000,-

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat


Dalam rangka menyusun renja PD, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan

kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan, karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh PD.

Hasil dari kajian musrembang yang telah dilaksanakan baik di tingkat Kelurahan/Desa maupun di tingkat Kecamatan dan Kabupaten Minahasa, tidak ada usulan dari pemangku kepentingan baik dari masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Minahasa yang harus ditampung berkaitan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa sehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk Tahun 2026. Deskripsi yang perlu disajikan antara lain: 1) penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; dan 2) penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dengan tidak adanya tuntutan masyarakat untuk meningkatkan peranan sosialisasi dan fasilitasi pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan investasi, namun menjadi inisiatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa untuk meningkatkan strategi promosi dan informasi yang merupakan media penting untuk menawarkan potensi investasi daerah sehingga masyarakat paham terhadap juknis mekanisme perizinan yang selanjutnya tentu akan meningkatkan minat investasi.

Penjabaran kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, dirumuskan dalam bentuk program sebagai kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu, guna mencapai tujuan dan sasaran. Program yang disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa setiap tahunnya tidak semua program dan kegiatan dapat diakomodir, karena keterbatasan anggaran yang disediakan.

Tabel 2.10 Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Minahasa (T-C.32.)

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN

### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana diamanatkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwasannya penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan renja harus menelaah kebijakan dan program prioritas nasional sebagai upaya mensinergikan program pusat dan daerah, menjadi hal yang penting adanya harmonisasi antara renstra dan renja kelembagaan pemerintah dengan renstra pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Telaahan terhadap kebijakan nasional RPJMN Tahun 2025-2029, merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045*”. Sejumlah transformasi dalam tahap pertama ini mencakup transformasi sosial; ekonomi; tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan wilayah dan sarana prasarana; serta kesinambungan pembangunan.

Visi tersebut akan diwujudkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita.

Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. *memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;*
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. *melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;*
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. *memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;* dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional yaitu: penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5%, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59%, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8% di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

Visi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM “Terwujudnya Penanaman Modal Yang Tinggi dan Berkualitas Untuk Menuju Indonesia Emas 2045”

Misi “Mengakselerasi Peningkatan Penanaman Modal untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global”

Tujuan yang akan dicapai yaitu “Meningkatnya Penanaman Modal yang Berfokus pada Sektor Prioritas termasuk Hilirisasi, Orientasi Ekspor, dan Berbasis Kewilayahan”

Indikator “nilai PMA dan PMDN” yang merupakan hasil telaahan pada program dan kegiatan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2025-2029 untuk mewujudkan visi yaitu:

- 1) Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Bernilai Tambah, Inklusif, Berorientasi Ekspor, dan Merata;
- 2) Terwujudnya Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang Bersih dan Efektif, serta Pelayanan Penanaman Modal yang Prima.

Untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) keterkaitannya dengan DPMPSTP adanya suatu tujuan, sasaran dan strategi yang sama untuk mewujudkan investasi yang kondusif dan berdaya saing, dalam

pelaksanaannya perlu didorong peningkatan kualitas perencanaan dan pengembangan iklim investasi, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan peningkatan sistem informasi penanaman modal, kemitraan UMKM dan usaha besar, kemudahan mengakses data.

Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik mengatur tentang peningkatan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan, dan pengembangan sistem *online* dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha. Penguatan investasi ditempuh melalui dua pilar kebijakan yaitu peningkatan iklim investasi dan iklim usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perijinan bisnis; peningkatan investasi yang inklusif terutama dari investor domestik. Kedua pilar kebijakan ini akan dilakukan secara terintegrasi baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Arah kebijakan yang ditempuh oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM sebagai berikut :

1. akselerasi peningkatan PM yang berfokus pada sektor prioritas PM dan hilirisasi investasi strategis;

Strategi :

- a. Memperkuat kebijakan perencanaan PM dengan sinergi kebijakan perencanaan lintas sektor;
- b. Pelaksanaan kegiatan promosi yang fokus dan terarah (*targeted*);
- c. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan PM dan fasilitasi pemanfaatan fasilitas PM untuk meningkatkan realisasi PM;
- d. Meningkatkan kualitas sosialisasi, pelayanan dan penyelesaian masalah perizinan berbasis resiko;
- e. Mengoptimalkan PM bidang hilirisasi untuk mendukung nilai tambah SDA;
- f. Memperkuat tata kelola teknologi informasi yang handal untuk mendukung layanan PM yang berkualitas dan percepatan peningkatan PM.

2. Meningkatkan kualitas iklim dan kerjasama PM;

Strategi :

- a. Meningkatkan kualitas iklim dan Kerjasama PM;
- b. Mendorong UMKM naik kelas untuk meningkatkan kemandirian PMDN;
- c. Mendukung pemetaan potensi PM di daerah untuk meningkatkan pemerataan realisasi PM;
- d. Meningkatkan kerjasama PM dengan negara-negara potensial dan stakeholders terkait, serta memperkuat kesepakatan dan perjanjian yang dapat diimplementasikan secara efektif.

3. Meningkatkan efektivitas tata kelola PM.

Strategi :

- a. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola PM;

- b. Meningkatkan kinerja aparatur yang berintegrasi, profesional dan berkualitas.

Terkait dengan hal memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan mengacu pada regulasi pemerintah pusat dan provinsi, perlu kerja keras untuk mewujudkannya termasuk kendala internal maupun eksternal yang memerlukan kesigapan dan kecekatan dalam meminimalisir dampak dari kendala-kendala tersebut dengan menyiapkan solusinya yang tertuang dalam program dan kegiatan-kegiatan serta memperhatikan regulasi pemerintah pusat dan provinsi.

Konsep arah pembangunan daerah sebagaimana dalam rencana strategis DPMPTSPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2029 adalah “Menuju Sulawesi Utara maju, sejahtera dan berkelanjutan”

Misi :

1. Mencegah dan memberantas KKN serta narkoba;
2. Meningkatkan kualitas SDM;
3. *Membangun perekonomian daerah;*
4. *Memperkuat daya saing daerah dan internasional;*
5. Meningkatkan ketahanan pangan, energi dan air yang merata dan berkelanjutan;
6. Memperbaiki tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, nyaman dengan melestarikan nilai-nilai budaya yang berkearifan lokal;
7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
8. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Tujuan “*Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif*” dengan indikator “Persentase peningkatan investasi”.

Sasaran DPMPTSPD Provinsi Sulawesi Utara yaitu “*Meningkatnya persentase pembentukan modal tetap bruto terhadap total PDRB*” dengan indikator : “Persentase kontribusi PMTB terhadap total PDRB”

Untuk pencapaian sasaran meningkatnya realisasi investasi, maka strategi yang akan dilakukan diantaranya adalah :

1. Meningkatkan iklim PM yang berdaya saing, melalui penyederhanaan perizinan berusaha dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha;
2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) prima;
3. Peningkatan Kualitas Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Fasilitasi Kepatuhan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha;
5. Pemberian insentif fiskal dan non fiskal kepada pelaku usaha tertentu;
6. Pendampingan proses penerbitan perizinan berusaha kepada pelaku usaha;
7. Meningkatkan fasilitasi penyelesaian hambatan berusaha.

Sedangkan arah pembangunan daerah Kabupaten Minahasa periode Tahun 2025-2029 adalah “Minahasa Daerah Pariwisata yang Maju dan Sejahtera”, dengan misi yang ditempuh agar mewujudkan visi tersebut adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM Minahasa yang sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing;
2. *Meningkatkan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mewujudkan ekonomi yang tangguh;*
3. *Memantapkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel berbasis digitalisasi dan inovatif untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima.*

Tujuan :

1. Terwujudnya pembangunan ekonomi daerah dengan indikator “PE,PDRB per kapita, rasio gini”;
2. Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih dengan Indikator “Indeks reformasi birokrasi”

Sasaran yang harus dicapai :

1. Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan dan investasi terhadap ekonomi daerah dengan indikator “PDRB, indeks daya saing daerah, rasio kewirausahaan”
2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pemerintahan dengan indikator “Indeks SPBE, indeks pencegahan korupsi”
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator “Indeks pelayanan publik”

Program-program yang mendukung kebijakan utama tersebut adalah :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota;
2. Program pengembangan iklim penanaman modal;
3. Program promosi penanaman modal;
4. Program pelayanan penanaman modal;
5. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
6. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.

Dalam rangka merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2026 perlu serangkaian tahapan serta memperhatikan dokumen perencanaan lainnya yang berlaku dan telah tersedia, yaitu:

1. Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
2. Arah dan prioritas kebijakan pembangunan nasional Tahun 2026;
3. Arah dan prioritas kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026;
4. Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029;
5. Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2025.

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

### 3.2.1. Tujuan

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi serta dapat menggambarkan mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD dan renstra PD Tahun 2025-2029, tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa yaitu :  
“Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif”

Indikator : Persentase peningkatan investasi

### 3.2.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu serta menyesuaikan dengan sasaran pada renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa yaitu :

1. Meningkatnya pertumbuhan PM;  
Indikator : “Persentase peningkatan usaha di daerah”
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kepuasan stakeholder terhadap pelayanan Perangkat Daerah.  
Indikator : 1. “Nilai akuntabilitas instansi pemerintah (predikat)”;  
2. “Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)”.

Tabel 3.1 Tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Minahasa Tahun 2026

VISI	: Minahasa Daerah Pariwisata Yang Maju Dan Sejahtera		
MISI 2	: Meningkatkan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mewujudkan ekonomi yang tangguh		
MISI 3	: Memantapkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel berbasis digitalisasi dan inovatif untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima		
MOTTO	Melayani anda kewajiban kami		
	Kepuasan anda kebanggaan kami		
Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif		Persentase peningkatan investasi	82,35
	1. Meningkatnya pertumbuhan PM	Persentase peningkatan usaha di daerah	0,35
	2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kepuasan stakeholder	1. Nilai akuntabilitas instansi pemerintah (predikat)	B
		2. Nilai IKM	82

	terhadap pelayanan Perangkat Daerah	3. Persentase instansi pemerintah dengan skor sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) (%)	80
--	-------------------------------------	--	----

### 3.3 Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Dalam upaya mencapai target tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam periode Tahun 2025-2029, rumusan penetapan rencana program, kegiatan dan subkegiatan PD Tahun 2026 dan prakiraan maju Tahun 2027 DPMPTSP Kabupaten Minahasa, sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, secara lebih lengkap disajikan pada table 3.2.

Tabel 3.2 Rencana program, kegiatan dan subkegiatan DPMPTSP Tahun 2026

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja program (outcomes)/ kegiatan (output)/ subkegiatan (sub output)	Target
1	2	3	4
	Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar		
2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal		
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi total terhadap target investasi	140 M 82,35%
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang pengembangan iklim penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten	14 Dokumen
2 18 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen
2 18 02 2.01 03	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	12 Dokumen
2 18 02 2.01 04	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 Dokumen
2 18 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen
2 18 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen
2 18 02 2.02 03	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1 Daerah
2 18 02 2.02 04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	16%
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	16 Dokumen
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen
2 18 03 2.01 03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja program (outcomes)/ kegiatan (output)/ subkegiatan (sub output)	Target
1	2	3	4
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	16,36%
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	56
2 18 04 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten	4 Dokumen
2 18 04 2.01 06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	150 Orang/Pelaku Usaha
2 18 04 2.01 07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 Orang Pelaku Usaha
2 18 04 2.01 08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko lintas daerah kab/ kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	100 Kegiatan Usaha
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	10,24%
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	4 Laporan
2 18 05 2.01 04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	7 Kegiatan Usaha
2 18 05 2.01 05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	175 Pelaku Usaha
2 18 05 2.01 06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi	30 Kegiatan Usaha

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja program (outcomes)/ kegiatan (output)/ subkegiatan (sub output)	Target
1	2	3	4
		Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	
2 18 06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	20%
2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sinkron	12 Laporan
2 18 06 2.01 02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1. Nilai SAKIP (predikat)	B
		2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82
2 18 01 2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang ditetapkan	15 Dokumen
2 18 01 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen
2 18 01 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
2 18 01 2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
2 18 01 2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
2 18 01 2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
2 18 01 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan
2 18 01 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja program (outcomes)/ kegiatan (output)/ subkegiatan (sub output)	Target
1	2	3	4
2 18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Teradministrasi	100%
2 18 01 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 ASN
2 18 01 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0
2 18 01 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0
2 18 01 2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0
2 18 01 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0
2 18 01 2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0
2 18 01 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	0
2 18 01 2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen
2 18 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terfasilitasi	95%
2 18 01 2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
2 18 01 2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
2 18 01 2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0
2 18 01 2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
2 18 01 2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja program (outcomes)/ kegiatan (output)/ subkegiatan (sub output)	Target
1	2	3	4
2 18 01 2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
2 18 01 2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0
2 18 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terfasilitasi	95%
2 18 01 2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	20 Unit
2 18 01 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	96 Paket
2 18 01 2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen
2 18 01 2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen
2 18 01 2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen
2 18 01 2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang
2 18 01 2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang
2 18 01 2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang
2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terfasilitasi	95 %
2 18 01 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket
2 18 01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket
2 18 01 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket
2 18 01 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
2 18 01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja program (outcomes)/ kegiatan (output)/ subkegiatan (sub output)	Target
1	2	3	4
2 18 01 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0
2 18 01 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan
2 18 01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
2 18 01 2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen
2 18 01 2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen
2 18 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai RKBMD	95 %
2 18 01 2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit
2 18 01 2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit
2 18 01 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit
2 18 01 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit
2 18 01 2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit
2 18 01 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
2 18 01 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit
2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98 %
2 18 01 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
2 18 01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
2 18 01 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan
2 18 01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja program (outcomes)/ kegiatan (output)/ subkegiatan (sub output)	Target
1	2	3	4
		Kantor yang Disediakan	
2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara sesuai RKPBMMD	93 %
2 18 01 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit
2 18 01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0
2 18 01 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0
2 18 01 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0
2 18 01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit
2 18 01 2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit
2 18 01 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

4.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Program merupakan kumpulan proyek-proyek yang berhubungan dan dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integrasi dalam mencapai sasaran kebijaksanaan secara keseluruhan dan unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029, dilakukan perumusan rencana kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi melalui penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan yang disertai indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran renja tersebut yang tertuang dalam RKPD yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kabupaten Minahasa.

Tabel 4.1 Penjabaran pelaksanaan pada DPMPTSP Kabupaten Minahasa

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program	Indikator Program
<b>VISI : Minahasa Daerah Pariwisata Yang Maju Dan Sejahtera</b>									
<b>Misi 2 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mewujudkan ekonomi yang tangguh</b>									
Terwujudnya pembangunan ekonomi daerah	PE, PDRB per kapita, rasio gini	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan dan investasi terhadap ekonomi daerah	PDRB, indeks daya saing daerah, rasio kewirausahaan	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase peningkatan investasi	Meningkatnya pertumbuhan penanaman modal	Persentase peningkatan usaha di daerah	Program pengembangan iklim penanaman modal	Realisasi total terhadap target investasi
								Program promosi penanaman modal	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi
								Program pelayanan penanaman modal	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program	Indikator Program
								Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha
								Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal
<b>Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel berbasis digitalisasi dan inovatif untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima</b>									
Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks reformasi birokrasi	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pemerintahan	Indeks SPBE, indeks pencegahan korupsi	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase peningkatan investasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kepuasan stakeholder terhadap pelayanan Perangkat Daerah	1 Nilai akuntabilitas instansi pemerintah (predikat)	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	1 Nilai SAKIP (predikat)
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks pelayanan publik				2 Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)		2 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
							3 Persentase instansi pemerintah dengan skor sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) (%)		

#### 4.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Rumusan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 yang akan dilaksanakan berdasarkan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Minahasa dijabarkan sebagai berikut:

##### 1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota:

Indikator kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah Nilai SAKIP dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan masing-masing target yaitu B dan 81.

Pelaksanaannya diimplementasikan melalui 7 kegiatan dan 23 sub kegiatan dengan outputnya, sebagai berikut:

##### 1.1 Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, di dukung dengan 7 subkegiatan yaitu :

1.1.1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, output 5 dokumen

1.1.2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, output 1 dokumen

1.1.3. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD, output 1 dokumen

1.1.4. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD, output 1 dokumen

1.1.5. Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA- SKPD, output 1 dokumen

1.1.6. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, output 4 laporan

1.1.7. Evaluasi kinerja perangkat daerah, output 2 laporan

##### 1.2 Administrasi keuangan perangkat daerah

1.2.1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, output 25 orang/bulan

##### 1.3 Administrasi kepegawaian perangkat daerah

1.3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya, output 96 paket

##### 1.4 Administrasi umum perangkat daerah

1.4.1 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, output 12 paket

1.4.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, output 12 paket

1.4.3 Penyediaan peralatan rumah tangga, output 12 paket

1.4.4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, output 12 paket

- 1.4.5 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, output 12 laporan
  - 1.5 Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
    - 1.5.1 Pengadaan mebel, output 20 unit
    - 1.5.2 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya, output 8 unit
    - 1.5.3 Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya, output 1 unit
    - 1.5.4 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya, output 8 unit
  - 1.6 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
    - 1.6.1 Penyediaan jasa surat menyurat, output 12 laporan
    - 1.6.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, output 12 laporan
    - 1.6.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, output 2 laporan
    - 1.6.4 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor, output 12 laporan
  - 1.7 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
    - 1.7.1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, output 2 unit
2. Program pengembangan iklim penanaman modal:  
 Indikator kinerja program pengembangan iklim penanaman modal adalah realisasi total terhadap target investasi Rp. 140 M dalam persen sebesar 82,35%. Program yang akan dilaksanakan hanya 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu:
- 2.1 Penetapan pemberian fasilitas / insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota
    - 2.2.1 Fasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota
3. Program promosi penanaman modal:  
 Indikator kinerja program promosi penanaman modal adalah persentase peningkatan investor yang berinvestasi dengan target kinerjanya 18%. Indikator ini digunakan untuk mengukur pertumbuhan investor dalam satu tahun.
- 3.1 Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota
    - 3.1.1 Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota, output 11 dokumen

3.1.2 Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan kabupaten/kota, output 5 dokumen

4. Program pelayanan penanaman modal:

Indikator kinerja program pelayanan penanaman modal adalah persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan dengan target kinerjanya 18%.

4.1 Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota

4.1.1 Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah, output 4 dokumen

4.1.2 Penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik, output 150 pelaku usaha

4.1.3 Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko, output 100 pelaku usaha

4.1.4 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko, output 100 kegiatan usaha

5. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal:

Indikator kinerja program pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha dengan target kinerjanya 12,50%. Indikator ini digunakan untuk mengukur pengurangan akan terjadinya permasalahan maupun hambatan yang dialami oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya di Kabupaten Minahasa. Program terdiri dari 1 kegiatan dengan 3 sub kegiatan yaitu:

5.1 Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota

5.1.1 Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya, output 7 kegiatan usaha

5.1.2 Bimbingan teknis kepada pelaku usaha, output 175 pelaku usaha

5.1.3 Pengawasan penanaman modal, output 30 kegiatan usaha

6. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal:
  - Indikator kinerja program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal adalah persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal dengan target kinerjanya 20%.
  - 6.1 Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota
    - 6.1.1 Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, output 12 dokumen

#### 4.2.1. Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2026

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud maka dirumuskan rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2026 dan perkiraan maju Tahun 2027 yang efeknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat atau *stakeholder*. Indikasi pendanaan program dan kegiatan Dinas PMPTSP didasarkan pada RKPD Kabupaten Minahasa Tahun 2026 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.035.179.478 yang terdiri dari Rp. 2.844.259.498,- untuk belanja operasi dan Rp. 7.190.919.980,- untuk belanja modal yang rencananya pembangunan MPP fisik. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah DPMPTSP Kabupaten Minahasa sebagaimana tabel 4.2:

Tabel 4.2  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 (T-C.33.)  
DPMPTSP Kabupaten Minahasa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar				3.676.506.900				22.571.880.846
2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				3.676.506.900				22.571.880.846
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi total terhadap target investasi	Kab. Minahasa	140 M 82,35%	19.999.640	DAU		150 M 88,23%	5.383.562.846
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang pengembangan iklim penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten	Kab. Minahasa	14 Dokumen	19.999.640	DAU		14 Dokumen	5.383.562.846
2 18 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Minahasa	1 Dokumen	0	DAU		1 Dokumen	882.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 18 02 2.01 03	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Kab. Minahasa	12 Dokumen	19.999.640	DAU		12 Dokumen	1.984.500.000
2 18 02 2.01 04	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Kab. Minahasa	1 Dokumen	0	DAU		1 Dokumen	259.087.500
2 18 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa	1 Dokumen	0	DAU		1 Dokumen	2.257.975.346
2 18 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa	1 Dokumen	0	DAU		1 Dokumen	240.400.346
2 18 02 2.02 03	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Kab. Minahasa	1 Daerah	0	DAU		1 Daerah	55.125.000
2 18 02 2.02 04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa	1 Dokumen	0	DAU		1 Dokumen	1.962.450.000
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	Kab. Min & tersebar	16%	69.800.000	DAU		19%	190.575.000
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Min & tersebar	16 Dokumen	69.800.000	DAU		19 Dokumen	190.575.000
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kab. Min & tersebar	3 Dokumen	0	DAU		3 Dokumen	160.325.000
2 18 03 2.01 03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Kab. Min & tersebar	1 Dokumen	69.800.000	DAU		1 Dokumen	30.250.000
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Kab. Min	16,36%	19.000.000	DAU		18%	605.000.000
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Min	56	19.000.000	DAU		56	605.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kabupaten/ Kota								
2 18 04 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten	Kab. Min	4 Dokumen	10.000.000	DAU		5 Dokumen	155.000.000
2 18 04 2.01 06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Min	150 Orang/Pelaku Usaha	1.000.000	DAU		150Pelaku Usaha	200.000.000
2 18 04 2.01 07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Min	100 Orang Pelaku Usaha	3.000.000	DAU		100 Orang Pelaku Usaha	100.000.000
2 18 04 2.01 08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko lintas daerah kab/ kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Kab. Min & tersebar	100 Kegiatan Usaha	5.000.000	DAU		100 Kegiatan Usaha	150.000.000
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	Kab. Minahasa	10,24%	39.999.760	DAU		12,50%	371.470.000
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Kab. Minahasa	4 Laporan	39.999.760	DAU		4 Laporan	371.470.000
2 18 05 2.01 04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Minahasa	7 Kegiatan Usaha	5.000.000	DAU		6 Kegiatan Usaha	91.560.000
2 18 05 2.01	Bimbingan Teknis kepada	Jumlah Pelaku Usaha yang	Kab.	175 Pelaku	19.999.760	DAU		200 Pelaku	224.660.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
05	Pelaku Usaha	Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Minahasa	Usaha				Usaha	
2 18 05 2.01 06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kab. Minahasa	30 Kegiatan Usaha	15.000.000,	DAU		30 Kegiatan Usaha	55.250.000
2 18 06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Kab. Minahasa	20%	1.000.000	DAU		20%	150.000.000
2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sinkron	Kab. Minahasa	12 Laporan	1.000.000	DAU		12 Laporan	150.000.000
2 18 06 2.01 02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kab. Minahasa	12 Dokumen	1.000.000	DAU		12 Dokumen	150.000.000
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1. Nilai SAKIP (predikat) 2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	DPMPPTSP DPMPPTSP	B 82	9.885.380.078	DAU		B 82	15.871.273.000
2 18 01 2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang ditetapkan	DPMPPTSP	15 Dokumen	5.500.000	DAU		15 Dokumen	5.500.000
2 18 01	Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan	DPMPPTSP	5 Dokumen	2.500.000	DAU		5 Dokumen	2.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.01.01	Perencanaan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah							
2 18 01 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPMPTSP	1 Dokumen	500.000	DAU		1 Dokumen	500.000
2 18 01 2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPMPTSP	1 Dokumen	500.000	DAU		1 Dokumen	500.000
2 18 01 2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DPMPTSP	1 Dokumen	500.000	DAU		1 Dokumen	500.000
2 18 01 2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	DPMPTSP	1 Dokumen	500.000	DAU		1 Dokumen	500.000
2 18 01 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPTSP	4 Laporan	500.000	DAU		4 Laporan	500.000
2 18 01 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	2 Laporan	500.000	DAU		2 Laporan	500.000
2 18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Teradministrasi	DPMPTSP	100%	2.090.963.000	DAU		100%	3.088.500.000
2 18 01 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP	25 ASN	2.090.963.000	DAU		25 ASN	3.087.000.000
2 18 01 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPMPTSP	0	0	DAU		1 Dokumen	500.000
2 18 01 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	DPMPTSP	0	0	DAU		0	0
2 18 01	Koordinasi dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Koordinasi	DPMPTSP	0	0	DAU		0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.02.04	Akuntansi SKPD	dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							
2 18 01 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMPTSP	0	0	DAU		0	0
2 18 01 2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	DPMPTSP	0	0	DAU		1 Dokumen	500.000
2 18 01 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	DPMPTSP	0	0	DAU		12 Laporan	0
2 18 01 2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DPMPTSP	1 Dokumen	0	DAU		1 Dokumen	500.000
2 18 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terfasilitasi	DPMPTSP	95%	0	DAU		96%	2.500.000
2 18 01 2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DPMPTSP	1 Dokumen	0	DAU		1 Dokumen	500.000
2 18 01 2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DPMPTSP	1 Dokumen	0	DAU		1 Dokumen	500.000
2 18 01 2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	DPMPTSP	0	0	DAU		0	0
2 18 01 2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMPTSP	1 Laporan	0	DAU		1 Laporan	500.000
2 18 01 2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMPTSP	1 Laporan	0	DAU		1 Laporan	500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 18 01 2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMPPTSP	1 Laporan	0	DAU		1 Laporan	500.000
2 18 01 2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	DPMPPTSP	0	0	DAU		0	0
2 18 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terfasilitasi	Kab. Min & tersebar	95%	42.500.000	DAU		96%	300.982.500
2 18 01 2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Min	20 Unit	0	DAU		20 Unit	66.150.000
2 18 01 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	DPMPPTSP	96 Paket	42.500.000	DAU		96 Paket	71.662.500
2 18 01 2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Min & tersebar	12 Dokumen	0	DAU		12 Dokumen	6.615.000
2 18 01 2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Min & tersebar	12 Dokumen	0	DAU		12 Dokumen	6.615.000
2 18 01 2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Min	12 Dokumen	0	DAU		12 Dokumen	6.615.000
2 18 01 2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Min & tersebar	5 Orang	0	DAU		5 Orang	55.125.000
2 18 01 2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Min & tersebar	50 Orang	0	DAU		50 Orang	33.075.000
2 18 01 2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Min & tersebar	5 Orang	0	DAU		5 Orang	55.125.000
2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terfasilitasi	DPMPPTSP	95 %	121.187.178	DAU		96 %	1.490.580.000
2 18 01 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DPMPPTSP	12 Paket	1.425.620	DAU		12 Paket	6.615.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 18 01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	12 Paket	25.766.800	DAU		12 Paket	13.230.000
2 18 01 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	DPMPTSP	25 Paket	13.378.758	DAU		30 Paket	13.230.000
2 18 01 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	1 Paket	0	DAU		1 Paket	2.205.000
2 18 01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DPMPTSP	12 Paket	3.000.000	DAU		12 Paket	26.460.000
2 18 01 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	DPMPTSP	0	0	DAU		0	
2 18 01 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMPTSP	12 Laporan	0	DAU		12 Laporan	66.150.000
2 18 01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersebar	12 Laporan	77.616.000	DAU		12 Laporan	1.349.460.000
2 18 01 2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMPTSP	12 Dokumen	0	DAU		12 Dokumen	6.615.000
2 18 01 2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DPMPTSP	12 Dokumen	0	DAU		12 Dokumen	6.615.000
2 18 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai RKBMD	DPMPTSP	95 %	7.184.310.780	DAU		96 %	9.546.000.000
2 18 01 2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	DPMPTSP	Unit	0	DAU		1 Unit	0
2 18 01 2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	DPMPTSP	1 Unit	0	DAU		3 Unit	1.580.000.000
2 18 01 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	DPMPTSP	20 Unit	98.945.340	DAU		20 Unit	441.000.000
2 18 01 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DPMPTSP	8 Unit	88.905.440	DAU		10 Unit	200.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 18 01 2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DPMPTSP	1 Unit	6.996.460.000	DAU		1 Unit	6.825.000.000
2 18 01 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DPMPTSP	Unit	0	DAU		10 Unit	300.000.000
2 18 01 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DPMPTSP	1 Unit	0	DAU		10 Unit	200.000.000
2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	98 %	397.860.200	DAU		98 %	439.603.000
2 18 01 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	12 Laporan	5.750.000	DAU		12 Laporan	8.820.000
2 18 01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DPMPTSP	12 Laporan	141.598.200	DAU		12 Laporan	165.375.000
2 18 01 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	2 Laporan	0	DAU		2 Laporan	6.300.000
2 18 01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	12 Laporan	250.512.000	DAU		12 Laporan	259.108.000
2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara sesuai RKPBMMD	DPMPTSP	93 %	43.058.920	DAU		94 %	997.607.500
2 18 01 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	DPMPTSP	2 Unit	38.480.000	DAU		4 Unit	47.407.500
2 18 01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DPMPTSP	0	0	DAU		1 Unit	5.200.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 18 01 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	DPMPTSP	0	0	DAU		0	0
2 18 01 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DPMPTSP	0	0	DAU		10 Unit	0
2 18 01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	DPMPTSP	1 Unit	0	DAU		1 Unit	525.000.000
2 18 01 2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	DPMPTSP	1 Unit	0	DAU		1 Unit	157.500.000
2 18 01 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	DPMPTSP	1 Unit	4.578.920	DAU		1 Unit	262.500.000

Rumusan rencana program dan kegiatan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tahun 2026 dan perkiraan maju tahun 2026 yang telah diinput dalam aplikasi SIPD adalah sebagaimana tabel berikut :

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD</b>
Pemerintahan Kab. Minahasa Tahun Anggaran 2026	

Organisasi : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

<b>Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan</b>
--

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
				Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1					
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)				
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU														
2														
2	18													
2	18	02			Rp. 19.999.640,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 19.999.640,00	Rp. 1.890.000.000,00				
2	18	02	2.01		Rp. 19.999.640,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 19.999.640,00	Rp. 1.890.000.000,00				
2	18	02	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 19.999.640,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 19.999.640,00	Rp. 1.890.000.000,00
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				Rp. 69.800.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 69.800.000,00	Rp. 25.000.000,00
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 69.800.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 69.800.000,00	Rp. 25.000.000,00
2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 69.800.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 69.800.000,00	Rp. 25.000.000,00
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				Rp. 19.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 19.000.000,00	Rp. 330.000.000,00
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				Rp. 19.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 19.000.000,00	Rp. 330.000.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 10.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 10.000.000,00	Rp. 100.000.000,00
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 1.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.000.000,00	Rp. 100.000.000,00
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 3.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 3.000.000,00	Rp. 100.000.000,00
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.000.000,00	Rp. 30.000.000,00
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			Rp. 39.999.760,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 39.999.760,00	Rp. 349.945.000,00
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 39.999.760,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 39.999.760,00	Rp. 349.945.000,00
2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.000.000,00	Rp. 84.945.000,00
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 19.999.760,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 19.999.760,00	Rp. 158.000.000,00
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 15.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 15.000.000,00	Rp. 107.000.000,00
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			Rp. 1.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.000.000,00	Rp. 12.000.000,00
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 1.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.000.000,00	Rp. 12.000.000,00
2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 1.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.000.000,00	Rp. 12.000.000,00
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp. 2.694.460.098,00	Rp. 7.190.919.980,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 9.885.380.078,00	Rp. 3.708.108.550,00

Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					Tahun + 1	
							Tahun - 1	Tahun N					
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp. 5.500.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 5.500.000,00	Rp. 5.250.000,00
2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 2.500.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.500.000,00	Rp. 2.100.000,00
2	18	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 500.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 500.000,00	Rp. 525.000,00
2	18	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 500.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 500.000,00	Rp. 525.000,00
2	18	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 500.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 500.000,00	Rp. 525.000,00
2	18	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 500.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 500.000,00	Rp. 525.000,00
2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 500.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 500.000,00	Rp. 525.000,00
2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 500.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 500.000,00	Rp. 525.000,00
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp. 2.090.963.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.090.963.000,00	Rp. 3.000.000.000,00
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 2.090.963.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.090.963.000,00	Rp. 3.000.000.000,00
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp. 42.500.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 42.500.000,00	Rp. 26.250.000,00
2	18	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 42.500.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 42.500.000,00	Rp. 26.250.000,00
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp. 114.577.978,00	Rp. 6.609.200,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 121.187.178,00	Rp. 81.498.400,00
2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 1.425.620,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.425.620,00	Rp. 1.426.500,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					Tahun + 1	
								Tahun - 1	Tahun N					Jumlah (Rp)
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 25.766.800,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 25.766.800,00	Rp. 22.100.000,00	
2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 6.769.558,00	Rp. 6.609.200,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 13.378.758,00	Rp. 0	
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 3.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 3.000.000,00	Rp. 3.095.900,00	
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 77.616.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 77.616.000,00	Rp. 54.876.000,00	
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp. 0,00	Rp. 7.184.310.780,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 7.184.310.780,00	Rp. 163.960.000,00	
2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 0	Rp. 98.945.340,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 98.945.340,00	Rp. 45.980.000,00	
2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 0	Rp. 88.905.440,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 88.905.440,00	Rp. 117.980.000,00	
2	18	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 0	Rp. 6.996.460.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 6.996.460.000,00	Rp. 0	
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 397.860.200,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 397.860.200,00	Rp. 388.960.150,00	
2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 5.750.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.750.000,00	Rp. 4.000.000,00	
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 141.598.200,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 141.598.200,00	Rp. 138.000.150,00	
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 250.512.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 250.512.000,00	Rp. 246.960.000,00	
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 43.058.920,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 43.058.920,00	Rp. 42.190.000,00	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 38.480.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 38.480.000,00	Rp. 42.190.000,00
2	18	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Minahasa, Tondano Utara, Sasaran	Rp. 4.578.920,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 4.578.920,00	Rp. 0
Jumlah								Rp. 2.844.259.498,00	Rp. 7.190.919.980,00			Rp. 10.035.179.478,00	Rp. 6.315.053.550,00
								Kab. Minahasa,..... Kepala DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  MEKRY J. SONDEY, SE, M.Si NIP. 196605061990031013					

### 4.3 Penjelasan Ketidaksesuaian

Penjelasan rumusan program, kegiatan dan subkegiatan yang tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan/subkegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya serta dasar hukum yang menjadi acuan telah berubah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dijabarkan dalam tabel rencana dibawah ini:

Tabel 4.3

Rumusan rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2026 DPMPTSP Kabupaten Minahasa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Ranwal Tahun 2026		Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Hasil Analisa Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar			4.988.853.915		Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar			10.035.179.478
2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal			4.988.853.915	2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal			10.035.179.478
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2 %	832.500.000	2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi total terhadap target investasi	140 M 82,35%	19.999.640
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	12.500.000	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang pengembangan iklim penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten	14 Dokumen	19.999.640
2 18 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	5.000.000	2 18 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	0
2 18 02 2.01 03	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara	6 Dokumen	5.000.000	2 18 02 2.01 03	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara	12 Dokumen	19.999.640

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Ranwal Tahun 2026		Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Hasil Analisa Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemerintah Kabupaten/Kota	Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				Pemerintah Kabupaten/Kota	Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah		
2 18 02 2.01 04	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 Dokumen	2.500.000	2 18 02 2.01 04	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 Dokumen	0
2 18 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	750.000.000	2 18 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0
2 18 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	2 18 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0
2 18 02 2.02 03	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1 Daerah	200.000.000	2 18 02 2.02 03	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1 Daerah	0
2 18 02 2.02 04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	500.000.000	2 18 02 2.02 04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0
2 18 02 3.03	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur	Tercapainya Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur	100 %	15.000.000		dikhhususkan untuk daerah tertentu			
2 18 02 3.03.01	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam	Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Dilaksanakan	10 Badan Usaha	15.000.000					
2 18 02 3.04	Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Tercapainya Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	100 %	15.000.000		dikhhususkan untuk daerah tertentu			
2 18 02 3.04.01	Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di	Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi	10 Badan Usaha	15.000.000					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Ranwal Tahun 2026		Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Hasil Analisa Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Wilayah Kabupaten/Kota	Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota							
2 18 02 3.05	Kemitraan Usaha Nasional	Tercapainya Jumlah kemityraan usaha nasional	100 %	15.000.000		dikhususkan untuk daerah tertentu			
2 18 02 3.05.01	Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	10 UMKM	15.000.000					
2 18 02 3.06	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.	Terlaksananya Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	25.000.000		dikhususkan untuk daerah tertentu			
2 18 02 3.06.01	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.	Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	25.000.000					
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	24 Investor	250.000.000	2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	16%	69.800.000
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	70 Pengunjung	250.000.000	2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	16 Dokumen	69.800.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Ranwal Tahun 2026		Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Hasil Analisa Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	200.000.000	2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	0
2 18 03 2.01 03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	50.000.000	2 18 03 2.01 03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	69.800.000
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai realisasi penanaman modal bidang perizinan	80.000.000.000	170.000.000	2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	16,36%	19.000.000
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	3 Laporan	170.000.000	2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	56	19.000.000
2 18 04 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten	10 Investor	30.000.000	2 18 04 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten	4 Dokumen	10.000.000
2 18 04 2.01 06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 / Pelaku Usaha	100.000.000	2 18 04 2.01 06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	150 Orang/Pelaku Usaha	1.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Ranwal Tahun 2026		Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Hasil Analisa Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 18 04 2.01 07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	50 Orang Pelaku Usaha	30.000.000	2 18 04 2.01 07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 Orang Pelaku Usaha	3.000.000
2 18 04 2.01 08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko lintas daerah kab/ kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	120 Kegiatan Usaha	10.000.000	2 18 04 2.01 08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko lintas daerah kab/ kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	100 Kegiatan Usaha	5.000.000
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang masuk di Kabupaten Minahasa	15 Laporan	448.700.000	2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	10,24%	39.999.760
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	3 Laporan	448.700.000	2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	4 Laporan	39.999.760
2 18 05 2.01 04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	8 Kegiatan Usaha	83.000.000	2 18 05 2.01 04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	7 Kegiatan Usaha	5.000.000
2 18 05 2.01 05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi	205 Pelaku Usaha	210.700.000	2 18 05 2.01 05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi	175 Pelaku Usaha	19.999.760

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Ranwal Tahun 2026		Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Hasil Analisa Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Berizinan Berusaha Berbasis Risiko					Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		
2 18 05 2.01 06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	13 Kegiatan Usaha	155.000.000	2 18 05 2.01 06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	30 Kegiatan Usaha	15.000.000
2 18 06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Data potensi sumber daya, sarana dan prasarana pendukung investasi	1 Dokumen	100.000.000	2 18 06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	20%	1.000.000
2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	100.000.000	2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sinkron	12 Laporan	1.000.000
2 18 06 2.01 02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	16 Dokumen	100.000.000	2 18 06 2.01 02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	1.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Ranwal Tahun 2026		Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Hasil Analisa Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1. Nilai SAKIP	A	3.187.653.915	2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP (predikat)	B	9.885.380.078
		2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	83				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82	
2 18 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang ditetapkan	14 Dokumen	5.000.000	2 18 01 2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang ditetapkan	15 Dokumen	5.500.000
2 18 01 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	2.000.000	2 18 01 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	2.500.000
2 18 01 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	500.000	2 18 01 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	500.000
2 18 01 2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	500.000	2 18 01 2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	500.000
2 18 01 2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	500.000	2 18 01 2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	500.000
2 18 01 2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	500.000	2 18 01 2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Ranwal Tahun 2026		Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Hasil Analisa Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 18 01 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	500.000	2 18 01 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	500.000
2 18 01 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	500.000	2 18 01 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	500.000
2 18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Teradministrasi	100%	2.251.643.000	2 18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Teradministrasi	100%	2.090.963.000
2 18 01 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 ASN	2.251.643.000	2 18 01 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 ASN	2.090.963.000
2 18 01 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	0	2 18 01 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	0
2 18 01 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	0	2 18 01 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	0	0
2 18 01 2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	0	2 18 01 2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	0
2 18 01 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	2 18 01 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Ranwal Tahun 2026		Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Hasil Analisa Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 18 01 2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0	2 18 01 2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0	0
2 18 01 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	0	2 18 01 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	0	0
2 18 01 2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	0	2 18 01 2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	0
2 18 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terfasilitasi	95%	3.000.000	2 18 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terfasilitasi	95%	0
2 18 01 2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	2 18 01 2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0
2 18 01 2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.000.000	2 18 01 2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0
2 18 01 2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	0	2 18 01 2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0	0
2 18 01 2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.000.000	2 18 01 2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Ranwal Tahun 2026		Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Hasil Analisa Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 18 01 2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	2 18 01 2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0
2 18 01 2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	2 18 01 2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0
2 18 01 2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.000.000	2 18 01 2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0	0
2 18 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terfasilitasi	95%	230.600.000	2 18 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terfasilitasi	95%	42.250.000
2 18 01 2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	20 Unit	10.000.000	2 18 01 2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	20 Unit	0
2 18 01 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	96 Paket	65.000.000	2 18 01 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	96 Paket	42.250.000
2 18 01 2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	1.000.000	2 18 01 2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	0
2 18 01 2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	3.600.000	2 18 01 2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	0
2 18 01 2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	1.000.000	2 18 01 2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	0
2 18 01 2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	45.000.000	2 18 01 2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Ranwal Tahun 2026		Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Hasil Analisa Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 18 01 2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50.000.000	2 18 01 2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	0
2 18 01 2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	55.000.000	2 18 01 2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	0
2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Terfasilitasi	95 %	265.020.915	2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terfasilitasi	95 %	121.187.178
2 18 01 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	24.020.915	2 18 01 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.425.620
2 18 01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	50.000.000	2 18 01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	25.766.800
2 18 01 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket	0	2 18 01 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	13.378.758
2 18 01 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	2 18 01 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0
2 18 01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.500.000	2 18 01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	3.000.000
2 18 01 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0	2 18 01 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	0
2 18 01 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	30.000.000	2 18 01 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Ranwal Tahun 2026		Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Hasil Analisa Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 18 01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150.000.000	2 18 01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	77.616.000
2 18 01 2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	500.000	2 18 01 2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	0
2 18 01 2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	0	2 18 01 2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	0
2 18 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai RKBMD	95 %	100.000.000	2 18 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai RKBMD	95 %	7.184.310.780
2 18 01 2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	2 18 01 2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0
2 18 01 2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0	2 18 01 2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0
2 18 01 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	0	2 18 01 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	98.945.340
2 18 01 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	100.000.000	2 18 01 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	88.905.440
2 18 01 2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	2 18 01 2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	6.996.460.000
2 18 01 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	2 18 01 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Ranwal Tahun 2026		Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Hasil Analisa Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 18 01 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	2 18 01 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0
2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98 %	240.200.000	2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98 %	397.860.200
2 18 01 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	25.000.000	2 18 01 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.750.000
2 18 01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	138.000.000	2 18 01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	141.598.200
2 18 01 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.000.000	2 18 01 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	0
2 18 01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	67.200.000	2 18 01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	250.512.000
2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara sesuai RKPBMMD	93 %	92.190.000	2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara sesuai RKPBMMD	93 %	43.058.920
2 18 01 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	42.190.000	2 18 01 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	38.480.000
2 18 01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	0	2 18 01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Ranwal Tahun 2026		Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Hasil Analisa Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 18 01 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	0	2 18 01 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	0
2 18 01 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	50.000.000	2 18 01 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	0
2 18 01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	0	2 18 01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	0
2 18 01 2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	0	2 18 01 2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	0
2 18 01 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	0	2 18 01 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	4.578.920

## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa Tahun 2026 disusun dengan harapan pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilakukan dengan optimal karena merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, administrasi dinas dan pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah dibidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian sesuai dengan kewenangannya, sehingga dapat mengatasi keluhan dan ketidakpuasan masyarakat selaku konsumen terhadap pelayanan publik dan sebagai tindak lanjut dari program nasional di bidang reformasi birokrasi yang berkorelasi pada perbaikan ekonomi masyarakat serta mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Minahasa.

### 5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

- 1) Penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Minahasa Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 2) Perumusan program, kegiatan dan subkegiatan beserta indikator pada Ranhir DPMPTSP Kabupaten Minahasa Tahun 2026, merupakan upaya dalam menunjang tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Minahasa yang efektif dan efisien juga dapat dipandang sebagai pilihan jalan bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan pada umumnya bagi *stakeholders* pembangunan secara keseluruhan;
- 3) Dokumen Renja Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan teknis operasional yang mengacu pada Renstra DPMPTSP Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029 dan RKPD yang memuat program, kegiatan dan subkegiatan beserta indikator juga respon terhadap kebutuhan dan isu-isu strategis DPMPTSP Kabupaten Minahasa Tahun 2026, dengan tujuan menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang ada dan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan;

- 4) Renja DPMPTSP Kabupaten Minahasa Tahun 2026 merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) DPMPTSP Kabupaten Minahasa Tahun 2026, kiranya dapat diakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2026 dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean govermances) dan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

## 5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2026 Kabupaten Minahasa yang memuat program kegiatan pembangunan daerah menjadi alasan utama suatu organisasi (pemerintah daerah) harus mendukung arahan prioritas pembangunan daerah agar mampu berkompetisi, berikut beberapa langkah demi pencapaian tujuan pembangunan:

- 1) Dokumen Renja wajib disusun setiap tahun oleh masing-masing PD;
- 2) Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan dalam Renja Tahun 2026 dilakukan secara konsisten, tertib, terpadu, sinergis dan berkesinambungan melalui kerjasama dan koordinasi seluruh pegawai DPMPTSP Kabupaten Minahasa dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan;
- 3) Perumusan kebijakan teknis; penyusunan perencanaan; pelaksanaan kegiatan; pembinaan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada dan dilaksanakan secara konsisten, akuntabel, transparan, profesional, partisipatif dan penuh tanggung jawab;
- 4) Renja DPMPTSP Kabupaten Minahasa terjadi berdasarkan reviu yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan Pembangunan daerah untuk tahun berikutnya.

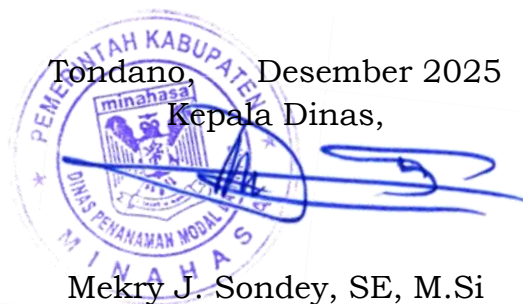
## 5.3 Rencana tindak lanjut

- 1) Renja DPMPTSP Kabupaten Minahasa Tahun 2026 memproyeksikan belanja sebesar Rp. 10.035.179.478 yang terdiri dari Rp. 2.844.259.498,- untuk belanja operasi dan Rp. 7.190.919.980,- untuk belanja modal yang rencananya pembangunan MPP fisik;
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan;

- 3) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 4) Rencana kerja ini sebagai pedoman kinerja dan evaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa;
- 5) Diharapkan pelaksanaan Renja Tahun 2026 Kabupaten Minahasa dapat mewujudkan tujuan pembangunan Tahun 2025-2029 yaitu meningkatkan investasi di Kabupaten Minahasa dan meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik, bersih dan terpercaya.

Demikian beberapa hal penyampaian dalam Renja Tahun 2026 ini agar dapat dijadikan pedoman dan pengontrol atau acuan bagi DPMPTSP Kabupaten Minahasa dan diharapkan dapat terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan untuk pembangunan daerah. Terima kasih.

Tondano, Desember 2025  
Kepala Dinas,



Mekry J. Sondey, SE, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660506 199003 1 013